

EVALUASI RKPD KABUPATEN BEKASI

TRIWULAN IV



**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

KATA PENGANTAR..... ii

BAB I **PENDAHULUAN** 1

 1.1 Latar Belakang..... 1

 1.2 Dasar Hukum 2

 1.3 Maksud dan Tujuan 4

 1.4 Sistematika Penyajian Laporan..... 4

BAB II **PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BEKASI**..... 6

 2.1 Gambaran Umum Daerah 6

 2.2 Visi dan Misi Kabupaten Bekasi..... 6

 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan 10

 2.4 Prioritas Pembangunan Tahun 2022..... 20

BAB IV **CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2022**..... 23

 3.1 Capaian Kinerja Sasaran..... 23

 3.2 Capaian Kinerja Program dan kegiatan..... 26

 3.3 Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama..... 38

BAB IV **FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA**..... 90

 4.1 Faktor Pendorong Dan Penghambat Pencapaian Kinerja..... 90

 4.2 Tindak Lanjut Bagi Pelaksanaan Triwulan/RKPD Berikutnya.. 91

BAB V **PENUTUP** 92

 5.1 Kesimpulan 92

 5.2 Rekomendasi 92

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa Laporan Pelaksanaan Evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten Bekasi Triwulan IV Tahun 2022 telah selesai disusun. Laporan ini merupakan pelaksanaan dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bupati Bekasi melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup Kabupaten Bekasi, antarkabupaten/kota dalam wilayah Kabupaten Bekasi.

Pelaksanaan Evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2022 dilakukan secara berkala setiap triwulan. Penyusunan laporan tersebut diformulasikan berdasarkan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil evaluasi Renja PD Kabupaten Bekasi yang disampaikan kepada Bappeda secara berkala setiap triwulan juga. Laporan ini merupakan hasil pencermatan dari tim pengendalian dan evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten Bekasi Triwulan IV Tahun 2022 yang meliputi:

- 1) Penelaahan terhadap realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja program, lokasi, dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD Kabupaten Bekasi.
- 2) Penelaahan realisasi penyerapan anggaran program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD Kabupaten Bekasi.

Hasil evaluasi sebagaimana yang telah tersusun di dalam laporan ini akan dipergunakan sebagai masukan/acuan guna percepatan pelaksanaan RKPD Kabupaten Bekasi Triwulan IV Tahun 2022.

Akhir kata, kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan dan kelemahan maka kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan penyusunan laporan ini. Terima kasih kami haturkan kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan ini.

Cikarang, Desember 2022

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN BEKASI**



Ir. H. ENTAH ISMANTO, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640105 199402 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sistem perencanaan pembangunan nasional di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana (Ginanjari Kartasasmita, 1994). Pada hakekatnya, pengertian pembangunan secara umum adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Perencanaan pembangunan dalam lingkup waktu dibedakan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 (duapuluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Sistem perencanaan pembangunan daerah yang baik mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

- (1) Politik;
- (2) Teknokratik;
- (3) Partisipatif;
- (4) Atas-bawah (top-down); dan
- (5) Bawah-atas (bottom-up).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan bupati dan wakil bupati adalah proses penyusunan rencana karena rakyat menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan oleh masing-masing calon bupati. Karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan bupati terpilih pada saat kampanye ke dalam RPJMD. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu (akademisi). Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Keterlibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan, dimana rencana hasil proses atas bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan di tingkat desa/kelurahan, kabupaten, provinsi dan nasional.

Penyusunan RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2022 berpedoman pada RKP Tahun 2022 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 5 ayat (3) juga disebutkan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) dijelaskan bahwa RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun ke depan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja



Daerah (RAPBD). Penyusunan RKPD harus dilakukan setiap tahun agar dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi sosial ekonomi, kebijakan pemerintah dan kemampuan keuangan daerah pada tahun bersangkutan.

RKPD disusun melalui tahap persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah dan musrenbang, perumusan rancangan akhir, fasilitasi gubernur, serta penetapan.

Evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mencakup sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan dan sub kegiatan. Evaluasi hasil untuk memastikan dan mengetahui secara obyektif kesesuaian antara hasil capaian rencana pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dan kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan rencana pembangunan dimaksud. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD Kabupaten Bekasi, untuk mengetahui realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD, dan realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD. Evaluasi yang dimaksud, dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bekasi dan mencapai sasaran pembangunan tahunan daerah Propinsi Jawa Barat.

1.2 DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan evaluasi RKPD Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Undang-undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Cara Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015- 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



18. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 59);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017- 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 7);
24. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013 Nomor 25);
25. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 53 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 53 Tahun 2018).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Evaluasi RKPD Kabupaten Bekasi Triwulan IV tahun 2022 dimaksudkan untuk menilai hasil pelaksanaan RKPD di lingkup wilayah Kabupaten Bekasi dan bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antara perencanaan program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikatornya yang telah disusun dalam RKPD sesuai dengan pelaksanaan APBD.

1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN

Evaluasi RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2022, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.4 Sistematika Penyajian Laporan



BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BEKASI

- 2.1 Gambaran Umum Daerah
- 2.2 Visi Dan Misi Kabupaten Bekasi
- 2.3 Tujuan Dan Sasaran Kabupaten Bekasi
- 2.4 Prioritas Pembangunan Tahun 2022

BAB IV CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022

- 3.1 Capaian Kinerja Sasaran
- 3.2 Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Tabel Evaluasi RKPD)
- 3.3 Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pencapaian Prioritas Pembangunan Provinsi Dan Nasional

BAB IV FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

- 4.1 Faktor Pendorong Dan Penghambat Pencapaian Kinerja
- 4.2 Tindak Lanjut Bagi Pelaksanaan Triwulan/RKPD Berikutnya

BAB V PENUTUP

- 5.1 Kesimpulan
- 5.2 Rekomendasi



BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BEKASI

2.1 GAMBARAN UMUM DAERAH

Secara geografis, Letak Kabupaten Bekasi berada pada posisi 6° 10' 53" - 6° 30' 6" Lintang Selatan dan 106° 48' 28" - 107° 27' 29" Bujur Timur. Topografinya terbagi atas dua bagian, yaitu dataran rendah yang meliputi sebagian wilayah bagian dan dataran bergelombang di wilayah bagian selatan (Kecamatan Cibarusah, Bojongmangu dan Setu). Ketinggian lokasi antara 6 – 115 meter dan kemiringan 0 – 250.

Kabupaten Bekasi memiliki luas wilayah 1.273,88 km² dengan kecamatan terluas yaitu Kecamatan Muaragembong seluas 140,09 km² dan kecamatan terkecil yaitu Kecamatan Kedungwaringin seluas 31,53 km². Secara administratif, Kabupaten Bekasi terdiri dari 23 Kecamatan, 7 Kelurahan, dan 180 desa dengan batas wilayah sebagai berikut:

Utara : Laut Jawa
 Selatan: Kabupaten Bogor
 Barat : Kota Jakarta Utara dan Kota Bekasi
 Timur : Kabupaten Karawang

Jumlah penduduk Kabupaten Bekasi pada tahun 2020 mencapai 3.113.017 jiwa penduduk dengan rata-rata kepadatan penduduk sebesar 2.444 jiwa per km². Wilayah yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Tambun Selatan (10.001 jiwa per km²), sedangkan yang paling rendah kepadatannya adalah Kecamatan Muaragembong (288 jiwa per km²).

Keberadaan penduduk kecamatan tidak menyebar secara merata. Penduduk paling banyak berdomisili di Kecamatan Tambun Selatan yaitu 13,85 % dari total penduduk Kabupaten Bekasi, sedangkan paling sedikit di Kecamatan Bojongmangu 0,89 %.

2.2 VISI DAN MISI KABUPATEN BEKASI

2.2.1 VISI KABUPATEN BEKASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022, visi pembangunan Kabupaten Bekasi untuk tahun 2017-2022 adalah Terwujudnya Kabupaten Bekasi BERSINAR (Berdaya Saing, Sejahtera, Indah, dan



Ramah Lingkungan) Tahun 2022. Visi tersebut diartikan sebagai berikut:

Berdaya saing, yaitu kondisi daerah dan masyarakat Kabupaten Bekasi yang memiliki keunggulan komparatif baik sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru maupun kualitas SDM yang mampu menjawab berbagai tantangan regional maupun global.

Sejahtera, yaitu kondisi Kabupaten Bekasi yang mampu menjamin warganya dalam keadaan makmur, sehat dan aman. Terpenuhinya berbagai kebutuhan dasar masyarakat serta kemudahan bagi masyarakat dalam berkarya dan mengaktualisasi diri.

Indah, yaitu kondisi lingkungan dan tata kota Kabupaten Bekasi yang nyaman dan indah sebagai citra diri Kabupaten Bekasi yang maju dan modern.

Ramah Lingkungan, yaitu pelaksanaan pembangunan senantiasa memperhatikan kelestarian lingkungan serta prinsip keberlanjutan untuk menjamin daya dukung lingkungan sehingga dapat dirasakan oleh generasi mendatang. Ada 4 aspek yang terkait dari makna visi tersebut, yaitu :

- Aspek ekonomi, mencakup bidang industri, pertanian dan pariwisata;
- Aspek sosial, mencakup manusia berkualitas dan berbudaya;
- Aspek administratif pemerintahan, mencakup tata kelola pemerintahan yang baik;
- Aspek lingkungan, mencakup berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Bidang industri, pembangunan Kabupaten Bekasi tetap berfokus pada sektor industri yang telah memberikan kontribusi dominan dalam perekonomian Kabupaten Bekasi. Walaupun demikian, sektor industri akan diarahkan pada pembangunan industri baik skala kecil, menengah maupun besar. Perhatian pada industri besar ditujukan pada upaya mempertahankan dan bahkan meningkatkan iklim investasi daerah yang telah kondusif, seperti keberadaan kawasan industri.

Bidang pertanian, pembangunan Kabupaten Bekasi juga akan diarahkan pada bidang pertanian, mengingat wilayah utara Kabupaten Bekasi didominasi oleh bidang pertanian. Pertanian yang dikembangkan ditujukan bagi pertanian komersial (modern dan produktivitas tinggi) menggantikan pola subsisten (tradisional dan produktivitas rendah) di semua subsektor pertanian, pangan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan. Pertanian modern membutuhkan modal yang dapat membuat sumber daya alam (lahan) dan sumber daya manusia (petani) menjadi lebih produktif. Peningkatan modal terkait sumber daya alam dilakukan melalui pengembangan jaringan irigasi dan input produksi berkualitas (bibit, pestisida/herbisida dan pupuk). Sementara peningkatan modal



Sumber Daya Manusia (SDM) dilakukan melalui pendidikan/pelatihan. Upaya intensifikasi dan diversifikasi pertanian juga akan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi pertanian. Oleh karena itu, dibutuhkan konsistensi anggaran yang berpihak pada sektor ini agar dapat menggerakkan perekonomian masyarakat Kabupaten Bekasi secara signifikan.

Bidang pariwisata, pembangunan Kabupaten Bekasi perlu memperhatikan sektor-sektor lain terkait aktivitas bidang industri, dimana sektor pariwisata adalah salah satunya. Pariwisata di sini mencakup sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Sektor industri yang merupakan kawasan industri terbesar di Asia Tenggara diharapkan mampu menarik investor untuk berinvestasi di sektor pariwisata ini. Hal ini sekaligus dapat menjadikan Kabupaten Bekasi sebagai pusat kunjungan kerja dari daya tarik pariwisata industrinya, serta menjadikan daerah-daerah pesisir, situ-situ, peninggalan-peninggalan sejarah sebagai obyek wisata baru, membangun gedung pusat seni budaya tradisional dan mendorong pelestarian seni budaya tradisional.

Manusia berkualitas dan berbudaya, mengandung pengertian bahwa masyarakat Kabupaten Bekasi yang hendak dibangun adalah masyarakat yang berkualitas serta memiliki budaya yang tinggi. Kualitas yang dimaksud di sini adalah yang mencerminkan produktivitas tinggi sehingga berdaya saing. Hal ini dapat dicapai melalui program sosial kemasyarakatan yang baik dari pemerintah daerah (seperti pendidikan dan kesehatan). Sementara berbudaya menggambarkan perilaku santun saling menghargai dalam setiap perbedaan dalam berpikir maupun bertindak, serta melibatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan bersama yang berkeadilan serta berlandaskan hukum. Masyarakat berbudaya adalah masyarakat yang memiliki empati yang tinggi serta mampu memahami diri dan lingkungannya sehingga dapat saling menghormati dan menghargai.

Tata kelola pemerintahan yang baik, mengandung pengertian bahwa pelaksanaan pembangunan di daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini juga mengandung konotasi pelibatan peran serta masyarakat sejak dalam proses perencanaan hingga implementasi program/proyek sehingga aspirasi masyarakat tercermin dalam program pembangunan pemerintah daerah dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih tepat. Transparansi tidak hanya dilihat dari sisi proses perencanaan hingga pelaksanaan, tetapi juga dari sisi penggunaan anggaran dan kinerja yang dicapai. Dengan demikian, tujuan akhir berupa kesejahteraan masyarakat



Kabupaten Bekasi dapat dicapai.

Berkelanjutan dan ramah lingkungan, mengandung pengertian bahwa aktivitas ekonomi Kabupaten Bekasi yang sudah baik saat ini dapat terus berlangsung dimasa datang (berkelanjutan). Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa pembangunan tidak hanya diterjemahkan oleh aspek ekonomi (pertumbuhanekonomi) saja, tetapi juga aspek sosial dan lingkungan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa didukung oleh keadilan sosial (pemerataan) dan daya dukunglingkungan akan cenderung rapuh. Keberhasilan di satu sisi (ekonomi) cenderung mengorbankan sisi lain (sosial dan lingkungan). Oleh sebab itu, pembangunan Kabupaten Bekasi ke depan harus memperhatikan tiga pilar pembangunan berkelanjutan ini (ekonomi, sosial, dan lingkungan). Dua aspek penting (ekonomidan sosial) telah tercantum dalam kata kunci visi di atas. Oleh sebab itu harus dipastikan bahwa aspek lingkungan juga perlu memperoleh perhatian dalam periode mendatang, terutama bagaimana mengurangi eksternalitas negatif dari proses pembangunan ekonomi (seperti pembuangan limbah padat dan cair, pencemaran air dan udara, kebisingan, dan lain-lain).

2.2.2 MISI KABUPATEN BEKASI

Adapun dalam rangka mewujudkan visi tersebut diatas, ditetapkan 8 (lima) misi pembangunan, antara lain:

1. Meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan yang responsif, profesional, transparan dan akuntabel.
2. Memantapkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.
3. Memantapkan perekonomian daerah melalui penguatan sektor perindustrian, perdagangan, pertanian dan pariwisata.
4. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
5. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemantapan penyediaan kebutuhan dasar yang layak.
6. Mewujudkan Kabupaten Bekasi yang lebih nyaman dan asri melalui penataanruang dan pembangunan infrastruktur yang terpadu.
7. Mewujudkan lingkungan masyarakat yang agamis dan tentram melalui pengembangan nilai-nilai budaya lokal.
8. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alamdan lingkungan hidup yang berkelanjutan.



2.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan untuk tahun 2017-2022, Pemerintah Kabupaten Bekasi menetapkan strategi dan arah kebijakan daerah yang dibagi berdasarkan misi daerah, yaitu:

MISI I: Tata Kelola Pemerintahan yang responsif, profesional, transparan dan Akuntabel

Untuk mewujudkan misi ini, strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan antara lain:

- 1 **Strategi : Mewujudkan pemerintahan berbasis teknologi informasi**
 Kebijakan : Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik menuju Kabupaten Bekasi smart city
- 2 **Strategi : Peningkatan pengelolaan Single Data Kabupaten Bekasi**
 Kebijakan : Penataan data dan informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
- 3 **Strategi : Meningkatkan kerjasama desiminasi dan distribusi informasi publik melalui media massa**
 Kebijakan : Optimalisasi penyebaran informasi public
- 4 **Strategi : Optimalisasi pengamanan informasi**
 Kebijakan : Peningkatan sarana pengamanan informasi
- 5 **Strategi : Memberdayakan kelompok informasi masyarakat**
 Kebijakan : Peningkatan sarana dan prasarana Teknologi Informasidan Komunikasi
- 6 **Strategi : Mewujudkan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah yang efektif**
 Kebijakan : Peningkatan regulasi serta sarana dan prasarana pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah
- 7 **Strategi : Penataan struktur organisasi yang tepat fungsi**
 Kebijakan : Penataan kelembagaan ketatalaksanaan serta penerapan standar pelayanan public
- 8 **Strategi : Meningkatkan kualitas pelayanan administrasikependudukan**
 Kebijakan : Penataan pengelolaan administrasi kependudukanberbasis TIK
- 9 **Strategi : Mempermudah proses perijinan dan non perijinan**
 Kebijakan : Penyediaan infrastruktur pelayanan public
10. **Strategi : Penegasan Batas Daerah/ Wilayah**
 Kebijakan : Penyediaan data batas Daerah/wilayah
11. **Strategi : Pembakuan Nama Rupabumi**
 Kebijakan : Penyediaan data unsur rupabumi untuk penyusunan Gasetir Nasional



12. **Strategi : Meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan desa**
 Kebijakan : 1. Meningkatkan pembinaan Aparatur Desa
 2. Peningkatan tata kelola keuangan desa dan sarana dan prasarana penunjang
 3. Peningkatan tata kelola keuangan desa dan sarana dan prasarana penunjang
 4. Peningkatan dan perluasan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
13. **Strategi : Meningkatkan pemanfaatan teknologi untuk penataan, penyelamatan dan pelestarian arsip**
 Kebijakan : Peningkatan sistem kearsipan untuk mencapai standar penyelenggaraan kearsipan
14. **Strategi : Peningkatan Kualitas Penelitian dan Riset Pembangunan Daerah**
 Kebijakan : Meningkatkan Kualitas Penelitian dan Pengembangan
15. **Strategi : Meningkatkan kerjasama pembangunan**
 Kebijakan : mewujudkan kerjasama antar daerah, kabupaten/kota, antar provinsi dan luar negeri
16. **Strategi : Meningkatkan capaian kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah**
 Kebijakan : Optimalisasi pelaporan capaian kinerja melalui E-LPPD
17. **Strategi : Peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah**
 Kebijakan : Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah
18. **Strategi : Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan PD di lingkungan Pemerintah**
 Kebijakan : Peningkatan Pengendalian Pembangunan daerah
19. **Strategi : Meningkatkan pelayanan kedinasan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**
 Kebijakan : Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
20. **Strategi : Meningkatkan profesionalisme ASN dan kompetensi APIP**
 Kebijakan : 1. Penerapan Zona integritas disetiap PD
 2. Penerapan kompetensi dan profesionalisme APIP
21. **Strategi : Peningkatan Tata Kelola Manajemen ASN**
 Kebijakan : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan ASN
 2. Penataan Asn dengan pola karir berbasis merit sistem
 3. Pengembangan kapasitas ASN
22. **Strategi : Meningkatkan Pengawasan intern Pemerintah**
 Kebijakan : Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah oleh PD
23. **Strategi : Optimalisasi sumber pendapatan**
 Kebijakan : 1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah
 2. Mengoptimalkan penguatan ekonomi makro dan informasi perekonomian



24. **Strategi : Meningkatkan investasi BUD**
Kebijakan : Mengoptimalkan keberadaan Badan Usaha Milik Daerah
25. **Strategi : Meningkatkan sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah**
Kebijakan : Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan aset daerah
26. **Strategi : Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga pemerintah melalui penyusunan laporan keuangan yang memenuhi standar akuntansi pemerintah**
Kebijakan : Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah oleh PD
27. **Strategi : Meningkatkan Efektifitas hubungan antara Pemda dengan DPRD**
Kebijakan : Penerapan skala prioritas pada Raperda yang diusulkan
28. **Strategi : Meningkatkan respondan adaptasi dalam fasilitasi kegiatan DPRD**
Kebijakan : Memfasilitasi dalam penyusunan perda
29. **Strategi : Meningkatkan peran legislatif dalam pembangunan daerah**
Kebijakan : Memfasilitasi kegiatan anggota legislative

MISI II: Memantapkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas

Untuk mewujudkan misi ini, strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan antara lain:

- 1 **Strategi : Meningkatkan Penggunaan Teknologi dalam Penyelenggaraan perpustakaan**
Kebijakan : Penyediaan akses informasi melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan perpustakaan
- 2 **Strategi : Memperluas kesempatan kerja formal**
Kebijakan : Meningkatkan serapan tenaga kerja pada pasar kerja formal
- 3 **Strategi : Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja**
Kebijakan : 1. Mendorong lembaga ketenagakerjaan yang kredibel
2. Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja
- 4 **Strategi : Mendorong pemuda agar aktif dalam berorganisasi**
Kebijakan : Meningkatkan Peran serta Pemuda dalam berorganisasi
- 5 **Strategi : Mendorong atlit dan pelatih agar mencapai prestasi**
Kebijakan : 1. Memberikan motivasi atlit dan pelatih
2. Memberikan Penghargaan bagi atlit yang berprestasi
- 6 **Strategi : Memanfaatkan dan mewujudkan fasilitas olahraga yang memadai**
Kebijakan : Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga yang berstandar nasional/internasional
- 7 **Strategi : Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan berbasis**



kemandirian berusaha

- Kebijakan : Penyelenggaraan pelatihan pemberdayaan perempuan sehingga mandiri secara ekonomi
- 8 **Strategi : Mewujudkan Pengarusutamaan Hak-hak Anak (PUHA) dan mewujudkan keluarga sehat, sejahtera dan mandiri**
- Kebijakan : Perwujudan Kabupaten Bekasi sebagai kota layak anak
- 9 **Strategi : Meningkatkan kapasitas sumber daya pengelola program KB**
- Kebijakan : Peningkatan peran kelembagaan keluarga kecil berkualitas
10. **Strategi : Pengendalian pertumbuhan penduduk**
- Kebijakan : Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dan meningkatkan kualitas tenaga penyuluh KB
- 11 **Strategi : Meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga**
- Kebijakan : Meningkatkan cakupan kelompok Bina-bina Keluarga
- 12 **Strategi : Meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga**
- Kebijakan : Meningkatkan cakupan PIK Remaja/Mahasiswa

MISI IV: Memantapkan Perekonomian Daerah Melalui Penguatan Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian Dan Pariwisata

Untuk mewujudkan misi ini, strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan antara lain:

1. **Strategi : Meningkatkan produktifitas dan kualitas sektor pertanian**
Kebijakan : 1. Meningkatkan teknologi pertanian dan optimalisasi lahan pertanian
2. Meningkatkan kualitas produksi pertanian
2. **Strategi : Meningkatkan pemasaran hasil pertanian**
Kebijakan : Membuka akses pemasaran hasil pertanian
3. **Strategi : Meningkatkan produktifitas dan kualitas sektor peternakan**
Kebijakan : 1. Meningkatkan produksi hasil peternakan
2. Meningkatkan penggunaan teknologi peternakan
3. Meningkatkan hasil pemasaran
4. **Strategi : Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan budidaya, perikanan laut dan perairan umum**
Kebijakan : 1. Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan budidaya, perikanan laut dan perairan umum
2. Meningkatkan produksi perikanan laut dan perairan umum
3. Meningkatkan nilai tambah hasil produksi perikanan
5. **Strategi : Meningkatkan ketahanan pangan**
Kebijakan : 1. Meningkatkan keberagaman hasil pertanian dan perkebunan
2. Meningkatkan cadangan pangan
3. Meningkatkan distribusi pangan



6. **Strategi : Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pertanian**
 Kebijakan : 1. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi
 2. Pembangunan dan pemeliharaan pintu air
7. **Strategi : Penguatan dan pengembangan destinasi Pariwisata**
 Kebijakan : Optimalisasi daya dukung potensi pariwisata yang berdaya saing serta pengembangan promosi pariwisata yang kreatif, terarah, terpadu dan berkelanjutan melalui pembuatan kebijakan kepariwisataan
8. **Strategi : Meningkatkan kunjungan wisatawan di Kabupaten Bekasi**
 Kebijakan : 1. Diversifikasi destinasi wisata seperti wisata alam, industri, sejarah, ziarah dan bahari
 2. Fasilitasi dan mediasi pengembangan kemitraan pariwisata
9. **Strategi : Meningkatkan Pengamanan perdagangan**
 Kebijakan : meningkatkan pelayanan kemetrolagian
10. **Strategi : Meningkatkan daya saing pasar tradisional**
 Kebijakan : meningkatkan penataan sarana dan prasarana perdagangan
11. **Strategi : Meningkatkan pembinaan dan penataan pedagang kaki lima dan asongan**
 Kebijakan : Mengoptimalkan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
12. **Strategi : Fasilitasi Promosi dagang produk ekspor unggulan**
 Kebijakan : Meningkatkan nilai ekspor produk unggulan
13. **Strategi : Mengoptimalkan Peran Kabupaten Bekasi dalam mempercepat pertumbuhan investasi**
 Kebijakan : Mendorong percepatan pertumbuhan investasi
14. **Strategi : Mempermudah proses perijinan dan non perijinan**
 Kebijakan : Penyederhanaan proses perizinan dan non perizinan melalui pelayanan terpadu
15. **Strategi : Meningkatkan kesejahteraan pekerja**
 Kebijakan : Pembinaan hubungan industrial meliputi LKS, BIP, pekerja, PP, PKB, P2K3, pengupahan perusahaan

MISI IV: Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi

Untuk mewujudkan misi ini, strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan antara lain:

1. **Strategi : Meningkatkan aksesibilitas produktivitas UMKMdand koperasi**



- Kebijakan : 1. Pengembangan Koperasi dan UMKM
2. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas koperasi sehat
2. **Strategi : Menciptakan wirausahawan baru**
Kebijakan : 1. Peningkatan Akses bagi UMKM
2. Mendorong Akses Teknologi Tepat Guna UMKM
3. **Strategi : Pembinaan dan penciptaan wirausahawan IKM**
Kebijakan : 1. Melaksanakan pelatihan dan kemampuan IKM
2. Mendorong Akses Teknologi Tepat Guna IKM

MISI V: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Pemantapan Penyediaan Kebutuhan Dasar Yang Layak

Untuk mewujudkan misi ini, strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan antara lain:

1. **Strategi : Meningkatkan mutu dan layanan pendidikan dasar**
Kebijakan : Penerapan Standar Nasional Pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
2. **Strategi : Meningkatkan mutu dan layanan pendidikan anak usia dini dan nonformal**
Kebijakan : 1. Penerapan Standar Nasional PAUD dalam menyusun kurikulum PAUD
2. Peningkatan kualitas lembaga pendidikan masyarakat
3. **Strategi : Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan**
Kebijakan : Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
4. **Strategi : Memperkuat penerapan Manajemen Berbasis Sekolah**
Kebijakan : Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan
5. **Strategi : Meningkatkan sarana Pembelajaran dan Pemerataan Pendidikan Dasar**
Kebijakan : 1. Penambahan sarana penunjang pendidikan anak usia dini dan nonformal
2. Pemenuhan sarana prasarana belajar mengajar sesuai standar pendidikan dasar
3. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pendidikan
6. **Strategi : Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta meningkatkan kondisi kesehatan lingkungan**
Kebijakan : Peningkatan Kondisi kesehatan lingkungan
7. **Strategi : Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat dan perorangan, pemberian Bantuan Iuran BPJS bagi masyarakat miskin serta penyediaan layanan kesehatan kelas I gratis bagi masyarakat**



miskin non PBI

- Kebijakan : Peningkatan upaya kesehatan masyarakat dan perorangan, pemberian Bantuan Iuran BPJS bagi masyarakat miskin serta penyediaan layanan kesehatan kelas I gratis bagi masyarakat miskin non PBI
8. **Strategi** : **Menurunkan angka kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular**
- Kebijakan : Penurunan angka kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular
9. **Strategi** : **Meningkatkan status gizi masyarakat**
- Kebijakan : Peningkatan status gizi masyarakat
10. **Strategi** : **Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya kesehatan**
- Kebijakan : Peningkatan sumber daya Kesehatan
11. **Strategi** : **Meningkatnya penyediaan obat serta pengawasan terhadap mutu obat dan makanan**
- Kebijakan : 1. Peningkatan kecukupan obat dan perbekalan kesehatan
2. Peningkatan pengawasan terhadap peredaran serta mutu obat dan makanan
12. **Strategi** : **Meningkatkan kebijakan manajemen kesehatan dan manajemen pembangunan kesehatan**
- Kebijakan : Peningkatan kebijakan dan manajemen di bidang kesehatan
13. **Strategi** : **Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar masyarakat terutama pelayanan dasar dan rujukan**
- Kebijakan : Peningkatan kuantitas, kualitas dan fungsi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas DTP dan PONEID dan jaringannya serta RSUD
14. **Strategi** : **Meningkatkan saranaprasarana dan infrastruktur RS**
- Kebijakan : 1. Menjamin ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan dan alat kesehatan
2. Menjamin ketersediaan sarana penunjang medis dan non medis
15. **Strategi** : **Meningkatkan kompetensi SDM RS**
- Kebijakan : 1. Menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten
2. Menyediakan Pelayanan Asuransi Kesehatan
3. Standarisasi Pelayanan RS
4. Meningkatkan Kinerja Keuangan RSUD
16. **Strategi** : **Peningkatan kesiapsiagaan dan waktu tanggap mencapai kejadian (Respon time) daerah layanan wilayah manajemen bahaya kebakaran**
- Kebijakan : meningkatkan waktu pencapaian kejadian bahaya kebakaran maksimal 15



- menit
17. **Strategi** : **Mengurangi resiko bencana dan meningkatkan ketangguhan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam menghadapi bencana**
Kebijakan : Peningkatan pemahaman dan kesiapan masyarakat terhadap Pencegahan dan Mitigasi Bencana
 18. **Strategi** : **Optimalisasi Lembaga/ Pengorganisasian SDM PB**
Kebijakan : Memfasilitasi dan mengoordinir Lembaga Pengorganisasian SDM PB
 19. **Strategi** : **Meningkatkan penanganan bencana alam**
Kebijakan : 1. Menyediakan sarana dan prasarana pertolongan bencana alam
2. Memfasilitasi pertolongan pertama kepada korban bencana alam
 20. **Strategi** : **Meningkatkan pembangunan infrastruktur air limbah**
Kebijakan : 1. Penyediaan sarana air minum
2. Meningkatkan pelayanan air limbah domestik
 21. **Strategi** : **Meningkatkan pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan**
Kebijakan : 1. Peningkatan prasarana dan sarana utilitas
2. Peningkatan indikator perumahan
3. Peningkatan pembangunan infrastruktur permukiman
4. Meningkatkan pembangunan MCK
 22. **Strategi** : **Rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen untuk penanganan PMKS**
Kebijakan : 1. Meningkatnya pelayanan & jaminan sosial
2. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Untuk PMKS

MISI VI: Mewujudkan Kabupaten Bekasi Yang Lebih Nyaman Dan Asri Melalui Penataan Ruang Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terpadu

Untuk mewujudkan misi ini, strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan antara lain:

1. **Strategi** : **Meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang sebagai daya dukung pembangunan**
Kebijakan : Penetapan seluruh rencana detail tata ruang kota dan peraturan zonasi secara bertahap
2. **Strategi** : **Optimalisasi penataan ruang melalui pengendalian pemanfaatan ruang**
Kebijakan : Peningkatan upaya integrasi sistem perencanaan tata ruang berbasis TIK
3. **Strategi** : **Meningkatkan pengawasan dan pengendalian Bangunan**
Kebijakan : Peningkatan penataan dan pengawasan pembangunan bangunan umum



4. **Strategi** : **Meningkatkan pemeliharaan bangunan negara**
Kebijakan : Pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan
5. **Strategi** : **Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan**
Kebijakan : Pelebaran, penambahan dan peningkatan jaringan jalan, drainase dan trotoar
6. **Strategi** : **Meningkatkan kapasitas dan kualitas jembatan**
Kebijakan : 1. Pelebaran dan penambahan jembatan
2. Pemeliharaan jembatan dan jalan
7. **Strategi** : **Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana pengendalian banjir**
Kebijakan : 1. Penyediaan sistem drainase yang terpadu dan tertata
2. Meningkatkan pembangunan turad/ talud/ bronjong/ lenning
3. Penyediaan kolam retensi
4. Normalisasi sungai kewenangan Kabupaten
5. Normalisasi saluran pembuang
8. **Strategi** : **Meningkatkan pemenuhan kebutuhan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum**
Kebijakan : Peningkatan upaya percepatan pengadaan lahan melalui koordinasi lintas sektor dan pendekatan persuasif kepada masyarakat
9. **Strategi** : **Mengoptimalkan sistem manajemen pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Kabupaten Bekasi**
Kebijakan : Pemantauan dan pemutakhiran data aset tanah dan/atau bangunan secara berkala melalui database yang terintegrasi
10. **Strategi** : **Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas**
Kebijakan : 1. Penyediaan prasarana dan fasilitas perhubungan
2. Peningkatan kualitas prasarana dan fasilitas LLAJ
3. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sesuai ketentuan
4. Penyediaan marka dan rambu - rambu lalu lintas
5. Penataan pelayanan angkutan
6. Penyediaan sarana dan prasarana perhubungan
11. **Strategi** : **Meningkatkan keselamatan angkutan sungai dan penyebrangan**
Kebijakan : Penyediaan sarana dan prasarana perhubungan air, sungai, danau.

MISI VII: Mewujudkan Lingkungan Masyarakat Yang Agamis Dan Tentram Melalui Pengembangan Nilai-nilai Budaya Lokal

Untuk mewujudkan misi ini, strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan antara lain:



1. **Strategi** : **Melaksanakan upaya peningkatan hubungan yang harmonis antara umat beragama, pemerintah dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan serta meningkatkan partisipasi dalam pembangunan**
 Kebijakan : Peningkatan Pembinaan terhadap FKUB, LSM, Ormas, OKP, Majelis Ta'lim, Imam Marbot, Amil Jenazah dll
2. **Strategi** : **Budaya politik partisipan mengharuskan masyarakat terlibat aktif di dalam proses politik dan kegiatan politik**
 Kebijakan : Peningkatan pendidikan politik kepada masyarakat
3. **Strategi** : **Melaksanakan Peningkatan Ketertiban dan Keamanan dilingkungan masyarakat**
 Kebijakan : Peningkatan Ketertiban dan Keamanan
4. **Strategi** : **Meningkatkan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah**
 Kebijakan : Peningkatan Operasi penegakan perda dilingkungan Kab. Bekasi
5. **Strategi** : **Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan seni dan budaya**
 Kebijakan : 1. Peningkatan frekuensi penyelenggaraan pentas/festival Seni budaya
 2. Peningkatan sarana prasarana dan fasilitas pusatkegiatan seni dan budaya

MISI VIV : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Pemantapan Penyediaan Kebutuhan Dasar Yang Layak

Untuk mewujudkan misi ini, strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan antara lain:

1. **Strategi** : **Perencanaan Pencegahan, pengendalian dan pengawasan pencemaran air dan udara**
 Kebijakan : Peningkatan pencegahan, pemantauan dan pengendalian pencemaran air dan udara
2. **Strategi** : **Optimalisasi jumlah sarana dan prasarana persampahan**
 Kebijakan : Meningkatkan volume sampah yang diproses di TPS 3R
3. **Strategi** : **Meningkatkan penghijauan dan pembangunan taman**
 Kebijakan : 1. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau
 2. Penataan Tempat Pemakaman Umum yang dikelola Pemda

2.4 PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2022

Prioritas pembangunan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 merupakan penjabaran dari strategi dan kebijakan RKPD Tahun 2022. Strategi dan Kebijakan RKPD Tahun 2022 merupakan penjabaran sasaran dari RPJPD



Tahun 2007- 2025, dengan mempertimbangkan isu strategis yang berpeluang akan terjadi pada pelaksanaan Pembangunan Tahun 2022. Selanjutnya dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan mengevaluasi capaian kinerja pembangunan terhadap permasalahan pembangunan daerah terkait dengan program pembangunan yang tercantum dalam RPJMD pada tahun rencana dan kemungkinan perubahannya.

Perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Bekasi Tahun 2022 dilakukan dalam rangka mencapai Visi Misi Pemerintah Kabupaten Bekasi dan arah pembangunan RPJPD Tahun 2007 – 2025, mewujudkan prioritas pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RKPD 2022. Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Bekasi tahun 2022 yaitu :

1. Pengembangan industri pertanian (agroindustri) yang mencakup subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan budidaya:
 - a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan (DPKP);
 - b. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat (DPKP);
 - c. Program Penanganan Kerawanan Pangan (DPKP);
 - d. Program Pengawasan Keamanan Pangan (DPKP);
 - e. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian (DPKP, DISPERNAKAN);
 - f. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian (DPKP);
 - g. Program Penyuluhan Pertanian (DPKP, DISPERNAKAN);
 - h. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian (DPKP);
 - i. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (DISPERNAKAN);
 - j. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan (DISPERNAKAN);
 - k. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan (DISPERNAKAN);
 - l. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (DISPERNAKAN);
 - m. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian (DISPERNAKAN);
 - n. Program Perizinan Usaha Pertanian (DISPERNAKAN);
 - o. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (DISPERINDAG);
 - p. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (DISPERINDAG);
 - q. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri (DISPERINDAG);



- r. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) (DPUPR);
 - s. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah (DPUPR);
 - t. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja (DISNAKERTRANS);
 - u. Program Penempatan Tenaga Kerja (DISNAKERTRANS);
 - v. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat (DPMD);
 - w. Program Peningkatan Kerjasama Desa (DPMD);
 - x. Rogram Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup (DLH);
 - y. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) (DLH);
 - z. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk) (DISKOPUKM);
 - aa. Program Pengembangan Umkm (DISKOPUKM);
 - bb. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (DISPARBUD);
 - cc. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (DISPARBUD);
2. Pengembangan pariwisata yang ramah lingkungan, berbasis pada kearifan dan budaya setempat serta melibatkan masyarakat setempat:
- a. Program Pengembangan Kebudayaan (DISPARBUD);
 - b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional (DISPARBUD);
 - c. Program Pengembangan Kesenian Tradisional (DISPARBUD);
 - d. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (DISPARBUD);
 - e. Program Pemasaran Pariwisata (DISPARBUD);
 - f. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (DISPARBUD);
 - g. Program Penyelenggaraan Jalan (DPUPR);
 - h. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (SATPOLPP DAN DAMKAR);
 - i. Program Penanggulangan Bencana (BPBD);
 - j. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) (DISPERKIM);
 - k. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik (DISKOMINFOTIK);
 - l. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) (DISHUB);
 - m. Program Perekonomian Dan Pembangunan (SETDA);
 - n. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik (KECAMATAN).



BAB IV
CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN
DAERAH TAHUN 2022

3.1 CAPAIAN KINERJA SASARAN

Dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi Tahun 2017 - 2022, terdapat beberapa indikator sasaran pembangunan yang ingin dicapai. Pencapaian Indikator Sasaran pembangunan tersebut sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Indikator Sasaran Pembangunan Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET TAHUN 2022	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH		REALISASI
					TRIWULAN IV T.A 2022
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	71,5 Poin	a.	Indeks Perencanaan	0
			b.	Indeks Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah	0
			c.	Indeks pengelolaan keuangan daerah	0
			d.	Indeks maturitas SPIP	0
			e.	Indeks Kapabilitas APIP	0
			f.	Nilai Kualitas Kebijakan	0
			g.	Indeks Kearsipan	0
			h.	Indeks Inovasi	0
			i.	Indeks Profesionalitas ASN	0
			j.	Indeks Sistem Merit	0
			k.	Indeks Smart City	0
			l.	Indeks Pelayanan Publik	0
2.	Indeks Demokrasi	70,28 Poin	m.	Tingkat Proporsi PAD terhadap pendapatan daerah	0
			a.	Indeks Demokrasi komponen kebebasan sipil dan hak-hak politik	0
			b.	Tingkat Fasilitasi Kapasitas, Hubungan Kelembagaan DPRD dan Pembahasan PERDA dan Penjaringan Aspirasi	0



NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET TAHUN 2022	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH		REALISASI TRIWULAN IV T.A 2022
			c.	Tingkat Fasilitas Perda Inisiatif Dewan	0
			d.	Tingkat Fasilitas Rekomendasi DPRD terhadap Eksekutif	0
3.	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	2,225 Poin	a.	Indeks Ketertiban Masyarakat	0
			b.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (persen)	0
			c.	Indeks Wawasan Kebangsaan	0
4.	Indeks Resiko Bencana	120,56 Poin	a.	Indeks Resiko Bencana Komponen Kapasitas Bencana	0
			b.	Tingkat Waktu Tanggap Daerah	0
			c.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	0
			d.	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	0
			e.	Indeks Risiko Bencana Komponen Tingkat Kerentanan	0
5.	Tingkat konektivitas antar wilayah	82,97 %	a.	Tingkat Konektivitas Antar Jalan Kabupaten	0
			b.	Tingkat Konektivitas Antar Permukiman dan Perumahan	0
			c.	Persentase transportasi yang berkeselamatan	0
6.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,21 Poin	a.	Indeks pendidikan	0
			b.	Indeks kesehatan	0
			c.	Tingkat capaian standar mutu nasional	0
			d.	Indeks Literasi	0
			e.	Indeks gemar membaca	0
			f.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (poin)	0
			g.	Indeks Perlindungan Anak	0
			h.	Indeks Pembangunan Pemuda (poin)	0
			i.	Indeks Pembangunan Kebudayaan	0
			j.	Sport Development Indeks Pengembangan Olah Raga	0



NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET TAHUN 2022	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH		REALISASI
					TRIWULAN IV T.A 2022
			k.	Tingkat pemenuhan prasarana pendidikan sesuai standar nasional	0
			l.	Tingkat pemenuhan prasarana kesehatan sesuai standar mutu layanan fasilitas kesehatan	0
			m.	indeks ketahanan pangan	0
			n.	Produktivitas pertanian	0
			o.	Produktivitas perikanan	0
			p.	Indeks Desa Membangun	0
			q.	Tingkat cakupan PPKS yang ditangani	0
			r.	Indeks Harga Konsumen	0
7.	Tingkat pengangguran terbuka	9,40 %	a.	tingkat partisipasi angkatan kerja	0
			b.	Pengembangan sentra industri	0
			c.	Pertumbuhan nilai ekspor	0
			d.	Tingkat pertumbuhan realisasi investasi	0
			e.	Jumlah pengembangan destinasi wisata	0
			f.	Tingkat pertumbuhan koperasi sehat	0
			g.	Tingkat pertumbuhan UMKM naik kelas	0
8.	Laju Pertumbuhan Penduduk	3,24 %	a.	Angka Kelahiran Total (TFR)	0
			b.	Indeks Kependudukan	0

Sumber Data : Belum ada penyerapan pelaksanaan kegiatan dalam Triwulan IV Tahun 2022

Pencapaian kinerja sasaran pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2022 merupakan hasil pengukuran evaluasi kinerja yang masih bersifat angka sementara, kendala yang dihadapi adalah selama Triwulan IV Pemerintah Daerah tidak dapat melaksanakan penyerapan anggaran yang disebabkan oleh masih dilakukannya penyesuaian penatausahaan keuangan dengan SIPD Kemendagri yang mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan di Perangkat Daerah selama bulan September s.d Desember



Tahun Anggaran 2022, oleh karena itu selama pelaporan Triwulan IV Tahun Anggaran 2022, capaian indikator sasaran tersebut belum ada yang tercapai.

3.2 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

Ringkasan Capaian Kinerja Program dan Kegiatan perangkat daerah se-Kabupaten Bekasi berdasarkan urusan yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV Tahun 2022

No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	URUSAN WAJIB	5.033.648.366.316	4.143.987.839.153	91,72	Sangat Tinggi	82,33	Tinggi
1	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	4.236.091.819.937	3.425.832.615.852	91,55	Sangat Tinggi	80,87	Tinggi
1.01	Pendidikan	1.921.634.601.583	1.700.711.202.245	91,28	Sangat Tinggi	88,50	Tinggi
1.02	Kesehatan	1.262.101.382.047	754.963.905.462	98,27	Sangat Tinggi	86,36	Sangat Tinggi
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	652.535.948.928	593.317.460.960	80,80	Tinggi	90,92	Tinggi
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	271.451.079.509	262.304.174.049	95,41	Sangat Tinggi	96,63	Sangat Tinggi
1.05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	96.183.775.108	85.852.185.602	86,80	Tinggi	89,26	Tinggi
1.06	Sosial	32.185.032.762	28.683.687.534	96,71	Sangat Tinggi	89,12	Tinggi
2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	797.556.546.379	718.155.223.301	91,90	Sangat Tinggi	90,04	Tinggi
2.07	Tenaga Kerja	29.513.134.444	25.266.915.273	86,77	Tinggi	85,61	Tinggi
2.08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	18.149.837.172	15.870.194.493	91,41	Sangat Tinggi	87,44	Tinggi
2.09	Pangan	14.414.319.800	12.719.265.392	90,24	Tinggi	88,24	Tinggi
2.10	Pertanahan	36.370.044.478	34.315.394.802	97,50	Sangat Tinggi	94,35	Sangat Tinggi
2.11	Lingkungan Hidup	180.936.272.599	158.417.737.995	97,19	Sangat Tinggi	87,55	Tinggi
2.12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	45.010.573.500	43.243.760.354	92,07	Sangat Tinggi	96,07	Sangat Tinggi
2.13	Pemberdayaan Masyarakat Desa	21.438.337.540	19.580.892.151	91,34	Sangat Tinggi	91,34	Sangat Tinggi
2.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	55.583.879.050	33.518.441.130	88,68	Tinggi	60,30	Rendah
2.15	Perhubungan	76.619.845.000	73.229.707.816	96,00	Sangat Tinggi	95,58	Sangat Tinggi
2.16	Komunikasi dan Informatika	46.364.543.000	37.412.968.674	82,10	Tinggi	80,69	Tinggi
2.17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	17.342.548.500	15.707.497.160	99,81	Sangat Tinggi	90,57	Tinggi
2.18	Penanaman Modal	27.868.951.695	26.080.552.273	96,06	Sangat Tinggi	93,58	Sangat Tinggi
2.19	Kepemudaan dan Olahraga	185.693.123.300	183.740.213.555	100,00	Sangat Tinggi	98,95	Sangat Tinggi
2.20	Statistik	571.716.000	445.084.200	66,72	Sedang	77,85	Tinggi
2.21	Persandian	445.346.000	373.223.000	85,00	Tinggi	83,81	Tinggi
2.22	Kebudayaan	24.548.677.301	22.805.798.373	95,00	Sangat Tinggi	92,90	Sangat Tinggi
2.23	Perpustakaan	1.915.137.000	1.868.096.480	100,00	Sangat Tinggi	97,54	Sangat Tinggi
2.24	Kearsipan	14.770.260.000	13.559.480.180	98,32	Sangat Tinggi	91,80	Sangat Tinggi
3	URUSAN PILIHAN	139.303.775.653	122.741.476.902	98,03	Sangat Tinggi	88,11	Tinggi
3.25	Kelautan dan Perikanan	15.819.889.000	13.410.306.120	100,00	Sangat Tinggi	84,77	Tinggi
3.26	Pariwisata	19.854.830.200	17.637.861.196	100,00	Sangat Tinggi	88,83	Tinggi
3.27	Pertanian	47.103.117.870	40.674.653.839	96,45	Sangat Tinggi	86,35	Tinggi
3.30	Perdagangan	43.335.317.583	39.006.668.746	97,11	Sangat Tinggi	90,01	Tinggi
3.31	Perindustrian	12.740.621.000	11.630.582.058	100,00	Sangat Tinggi	91,29	Sangat Tinggi
3.32	Transmigrasi	450.000.000	381.404.943	94,59	Sangat Tinggi	84,76	Tinggi
4	PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	325.163.344.421	282.482.326.248	90,31	Tinggi	86,87	Tinggi
4.01	Sekretariat Daerah	204.754.889.321	193.057.312.702	95,00	Sangat Tinggi	94,29	Sangat Tinggi
4.02	Sekretariat DPRD	120.408.455.100	89.425.013.546	85,62	Tinggi	74,27	Sedang
5	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.028.408.558.460	938.267.272.642	99,34	Sangat Tinggi	91,23	Sangat Tinggi
5.01	Perencanaan	28.088.403.735	26.810.879.786	98,65	Sangat Tinggi	95,45	Sangat Tinggi
5.02	Keuangan	941.364.211.958	886.621.299.157	98,06	Sangat Tinggi	94,18	Sangat Tinggi
5.03	Kepegawaian	30.044.695.000	24.815.039.254	100,00	Sangat Tinggi	82,59	Tinggi
5.04	Pendidikan dan Pelatihan	10.803.810.000	10.251.699.700	100,00	Sangat Tinggi	94,89	Sangat Tinggi
5.05	Penelitian dan Pengembangan	18.107.437.767	16.579.234.531	100,00	Sangat Tinggi	91,56	Sangat Tinggi
6	PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	38.020.303.000	32.298.891.329	85,00	Tinggi	84,95	Tinggi
6.01	Inspektorat	38.020.303.000	32.298.891.329	85,00	Tinggi	84,95	Tinggi
7	PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN	202.689.534.215	185.987.203.700	95,00	Sangat Tinggi	91,76	Sangat Tinggi
7.01	Kecamatan	202.689.534.215	185.987.203.700	95,00	Sangat Tinggi	91,76	Sangat Tinggi
8	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	28.626.625.900	27.180.948.447	86,80	Tinggi	94,95	Sangat Tinggi
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik	28.626.625.900	27.180.948.447	86,80	Tinggi	94,95	Sangat Tinggi
	TOTAL	6.795.860.507.965	5.732.945.958.421	92,24	Sangat Tinggi	84,36	Tinggi



Pencapaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan IV pada tahun anggaran 2022, untuk keseluruhan program dan kegiatan di Kabupaten Bekasi, capaian kinerja sebesar 92,24 % dengan capaian realisasi penyerapan anggaran sebesar 84,36%. Capaian tersebut terdiri dari Urusan Wajib Pelayanan Dasar sebesar 91,55% dengan capaian realiasi penyerapan anggaran sebesar 80,87 %, Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebesar 91,90 % dengan capaian realiasi penyerapan anggaran sebesar 90,04 %, Urusan Pilihan sebesar 98,03 % dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 88,11 %, Unsur Pendukung Urusan Pemerintah sebesar 90,31 % dengan penyerapan anggaran sebesar 86,67 %, Unsur Penunjang Urusan Pemerintah sebesar 99,34 % dengan penyerapan anggaran sebesar 91,23 %, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintah sebesar 85,00 % dengan penyerapan anggaran yang sebesar 84,95 %, Unsur Kewilayahan sebesar 95,00% dengan penyerapan anggaran yang sebesar 91,76 dan Unsur Pemerintahan Umum sebesar 86,80 % dengan penyerapan anggaran 94,95 %.

3.3 CAPAIAN REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Capaian realisasi indikator kinerja utama (IKU) Kabupaten Bekasi triwulan IV Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:



Tabel 3.3
Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG	PENJELASAN FAKTOR PENGHAMBAT	STRATEGI PENINGKATAN CAPAIAN IKU TAHUN 2023	PROGRAM PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	SUB KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	ANGGARAN SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI								
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	87	83,04	90									
2	Peringkat LPPD tingkat Provinsi dan Nasional	20 Nasional (kabupaten)	belum keluar penetapan peringkat se-nasional	10 Nasional (kabupaten)	tidak keluar penetapan peringkat se-Indonesia dari tahun 2020	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	belum keluarnya penetapan peringkat dari kemendagri sehingga tidak mengukur	proses dalam pencapaian target dengan cara melaksanakan bimtek penyusunan LPPD	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	620,961,000	Bagian Tata Pemerintahan
3	Indeks Profesionalitas ASN	83,45	83,48	86	62,11	Adanya aplikasi Bekasi Integrated System Manajemen ASN (BISMA)	Peralihan metode pengukuran dari yang semula menggunakan pengukuran mandiri menjadi pengukuran melalui penarikan data SAPK secara otomatis.	Peninjauan kembali atau penyesuaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dampak berubahnya regulasi tentang perhitungan Indeks Profesionalitas ASN.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	175,000,000	BKPSDM
					Nilai IP ini hasil penilaian BKN Kanreg III Bandung Peringkat 4 dari 37 Instansi di lingkungan Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN						Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2,267,000,000	BKPSDM



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG	PENJELASAN FAKTOR PENGHAMBAT	STRATEGI PENINGKATAN CAPAIAN IKU TAHUN 2023	PROGRAM PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	SUB KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	ANGGARAN SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI								
						Adanya kesempatan yang diberikan oleh Kanreg III BKN untuk melakukan rekonsiliasi data sehingga nilai IP ASN Kabupaten Bekasi dapat diperbaiki	Data SAPK tidak up to date karena tidak dilengkapi dengan seluruh data pendukung yang diperlukan. Biasanya hanya yang akan naik pangkat atau pensiun saja yang diupdate oleh admin perangkat daerah.	Meningkatkan program Peningkatan Pendidikan Formal bagi seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.			Sub Kegiatan Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	89,000,000	BKPSDM
						Adanya kerjasama yang baik antara BKPSDM dengan seluruh Perangkat Daerah melalui Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi sehingga data pendukung yang diperlukan terkait kinerja maupun kompetensi dapat dipenuhi dalam waktu singkat	SAPK belum terhubung dengan MySAPK yang dientry oleh seluruh pegawai dan belum terhubung dengan Sistem Informasi Kepegawaian BISMA secara dua arah.	Memperbanyak diklat-diklat teknis yang akan meningkatkan kompetensi aparatur atau minimal 20 (dua puluh) jam pelajaran bagi setiap ASN. Hal ini juga bertujuan untuk memperkuat spesialisasi sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan.			Sub Kegiatan Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	446,500,000	BKPSDM



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG	PENJELASAN FAKTOR PENGHAMBAT	STRATEGI PENINGKATAN CAPAIAN IKU TAHUN 2023	PROGRAM PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	SUB KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	ANGGARAN SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI								
						Adanya kesempatan untuk mengikuti diklat/seminar/pelatihan/kursus/workshop secara online sehingga jumlah minimal jam pelajaran yang harus dipenuhi oleh setiap pegawai selama satu tahun dapat lebih mudah tercapai	Tingginya target IPP yang ditetapkan dan tidak direspon dengan regulasi terbaru yaitu Pemenuhan 30 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Menumbuh kembangkan budaya kerja mencatat hasil kerja harian yang dihasilkan dengan cara menyebarkan dokumen SAP bulanan sebagai syarat administrasi pemberian tambahan penghasilan pegawai.			Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	1,025,000,000	BKPSDM
						Kesadaran pegawai untuk segera membuat SAP sudah semakin		Perlu dikaji pemberian reward kepada aparatur yang dapat		Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	205,000,000	BKPSDM
								Dengan memasukkan IP ASN dalam prioritas anggaran dan			Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	337,500,000	BKPSDM
											Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	1,947,500,000	BKPSDM
										Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	62,500,000	BKPSDM
											Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	150,000,000	BKPSDM



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG	PENJELASAN FAKTOR PENGHAMBAT	STRATEGI PENINGKATAN CAPAIAN IKU TAHUN 2023	PROGRAM PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	SUB KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	ANGGARAN SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI								
											Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	175,000,000	BKPSDM
										Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	75,000,000	BKPSDM
											Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	400,000,000	BKPSDM
											Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	175,000,000	BKPSDM
											Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	260,000,000	BKPSDM
											Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	50,000,000	BKPSDM
											Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	90,000,000	BKPSDM
											Evaluasi Disiplin ASN	50,000,000	BKPSDM
									PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urutan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urutan Pemerintahan Umum	6,125,000,000	BKPSDM



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG	PENJELASAN FAKTOR PENGHAMBAT	STRATEGI PENINGKATAN CAPAIAN IKU TAHUN 2023	PROGRAM PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	SUB KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	ANGGARAN SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI								
										Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4,490,000,000	BKPSDM
4	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	6,67%	6,72%	6,71%		Telah diberitkannya Keputusan Mahkamah Bupati Bekasi Nomor HK.02.02/Kep.3 04-Bapenda/2022 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PDB-P2) di Kabupaten Bekasi Tahun 2022	Adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 80/PUU-XV/2017 tanggal 13 Desember 2018 tentang Sumber Tenaga Listrik Sebagai Objek Pajak Penerangan Jalan sehingga Pajak Penerangan Jalan yang bersumber dari selain PLN tidak dapat dipungut	Strategi pengembangan pelayanan pajak daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	41,500,000	Badan Pendapatan Daerah
						Telah diberitkannya Keputusan Mahkamah Bupati Bekasi Nomor HK.02.02/Kep.3 05-Bapenda/2022 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Piutang Pajak Daerah di Kabupaten Bekasi Tahun 2022	Kurangnya kegiatan bimbingan teknis & webinar/seminar mengenai perpajakan bagi ASN	Strategi peningkatan dan pengembangan pengelolaan pajak			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	221,500,000	Badan Pendapatan Daerah



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG	PENJELASAN FAKTOR PENGHAMBAT	STRATEGI PENINGKATAN CAPAIAN IKU TAHUN 2023	PROGRAM PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	SUB KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	ANGGARAN SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI								
						Telah dilakukan pelayanan pembayaran semua jenis pajak secara online		Strategi peningkatan monitoring, evaluasi dan analisa Pajak Daerah			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	296,740,000	Badan Pendapatan Daerah
						Pelaksanaan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah		Strategi peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1,466,012,336	Badan Pendapatan Daerah
						Pelaksanaan Pelayanan Keliling Pembayaran PBB-P2		Strategi pengembangan sistem koordinasi Dinas penghasil retribusi untuk peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	340,825,100	Badan Pendapatan Daerah
						Pemberian penghargaan (reward) kepada Desa/Kelurahan atas keberhasilan pemungutan pajak					Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	653,037,392	Badan Pendapatan Daerah
											Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	536,826,700	Badan Pendapatan Daerah
											Penagihan Pajak Daerah	142,175,200	Badan Pendapatan Daerah
											Penagihan Pajak Daerah (UPTD Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah Wilayah I)	10,320,000	Badan Pendapatan Daerah



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG	PENJELASAN FAKTOR PENGHAMBAT	STRATEGI PENINGKATAN CAPAIAN IKU TAHUN 2023	PROGRAM PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	SUB KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	ANGGARAN SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI								
											Penagihan Pajak Daerah (LUPD Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah Wilayah II)	17,180,000	Badan Pendapatan Daerah
											Penagihan Pajak Daerah (LUPD Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah Wilayah III)	32,000,000	Badan Pendapatan Daerah
											Penagihan Pajak Daerah (LUPD Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah Wilayah IV)	60,000,100	Badan Pendapatan Daerah
											Penyalakan Keberatan Pajak Daerah	40,050,000	Badan Pendapatan Daerah
											Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	145,115,000	Badan Pendapatan Daerah
											Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	100,626,000	Badan Pendapatan Daerah



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG	PENJELASAN FAKTOR PENGHAMBAT	STRATEGI PENINGKATAN CAPAIAN IKU TAHUN 2023	PROGRAM PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	SUB KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	ANGGARAN SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI								
5	OPINE BPK	WTP	WTP	WTP	-	Laporan Keuangan seluruhnya tersaji secara lengkap	Kompetensi SDM yang masih kurang mampu melakukan analisis atas transaksi dan menjadi problem solver sehingga sering terjadi keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Melaksanakan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan dan Triwulan yang akurat dan akuntabel	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Pemantauan Daerah tentang APBD dan Pemantauan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	97,372,500	BPKD
						Penyajian Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Perangkat Daerah yang diwajibkan meniadakan/ju ti masalah yang di rekomendasikan BPK belum dilakukan secara efektif dan optimal	Melaksanakan Sistem Pengendalian Internal dari Perangkat Daerah		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Penatausahaan Pembayasan Daerah	400,000,000	BPKD
						Pengungkapan dalam Laporan Keuangan sudah memadai		Menyelenggarakan Monitoring Pelaporan Anggaran setiap Triwulan		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	30,000,000	BPKD
						Tidak terdapat adanya kondisi yang dicekualikan dalam Laporan Keuangan			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah	448,316,000	BPKD



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG	PENJELASAN FAKTOR PENGHAMBAT	STRATEGI PENINGKATAN CAPAIAN IKU TAHUN 2023	PROGRAM PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	SUB KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	ANGGARAN SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI								
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	6.10%	10.09%	5.55%		Terdapat Program pelatihan (skill-up) pada Dinas Tenaga Kerja	Bonus Demografi penduduk usia kerja	Peningkatan layanan Informasi pasar kerja melalui Pengimplementasian sistem Informasi pasar kerja untuk forecasting demand yang tepat sehingga dapat mempertajam supply atau ketersediaan tenaga kerja lebih dini; Peningkatan pemantauan data Informasi pasar kerja dalam rangka penyusunan bahan data Informasi pasar kerja untuk mengoptimalkan pelayanan Informasi pasar kerja;	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan antar Kerja	425,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
						Adanya pengenalan dunia kerja di sekolah-sekolah khususnya SMK	Adanya Daerah Industri atau padat usaha sehingga mengundang orang-orang dari berbagai daerah datang ke Kabupaten Bekasi,	Peningkatan produktivitas wirausaha melalui pembinaan peningkatan produktivitas terhadap perusahaan kecil dan menengah; Peningkatan pemantauan data produktivitas di perusahaan; Peningkatan sosialisasi tentang pengukuran dan analisa produktivitas pada perusahaan.					



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG	PENJELASAN FAKTOR PENGHAMBAT	STRATEGI PENINGKATAN CAPAIAN IKU TAHUN 2023	PROGRAM PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	SUB KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	ANGGARAN SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI								
						Tersedianya akses informasi kerja/ lowongan & ketermediasan SDM	kurangnya link & Match antara dunia sekolah & dunia Industri	Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui Peningkatan kualitas calon tenaga kerja dari pelatihan dasar-dasar KI dan etos kerja calon tenaga kerja agar dapat bersaing di dunia Industri; Sertifikasi calon tenaga kerja supaya dapat bersaing di dunia kerja; Pelaksanaan program penagangan yang pembayarannya dibantu oleh perusahaan agar meminimalisir pengeluaran APBD; Pelaksanaan			Penyenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	60,000,000	Dinas Ketenagakerjaan



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG	PENJELASAN FAKTOR PENGHAMBAT	STRATEGI PENINGKATAN CAPAIAN IKU TAHUN 2023	PROGRAM PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	SUB KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	ANGGARAN SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI								
						Terdapat Peningkatan kompetensi & Tenaga kerja	kurangnya skill & kompetensi pada masyarakat angkatan kerja di Kabupaten Bekasi	Pelaksanaan hubungan Industrial yang harmonis melalui Pembinaan dan peningkatan kepatuhan terhadap pelaksanaan penyiaran kerja di perusahaan; Peningkatan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja; Penyelesaian pemilihan hubungan Industrial dan pemutusan hubungan kerja; Penetapan upah minimum dan pengembangan sistem pengupahan; Pelaksanaan deteksi dini permasalahan					



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG	PENJELASAN FAKTOR PENGHAMBAT	STRATEGI PENINGKATAN CAPAIAN IKU TAHUN 2023	PROGRAM PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	SUB KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	ANGGARAN SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI								
						Pada Investor dari dalam dan luar negeri yang mengembangkan usahanya di Kabupaten Bekasi dan mau merekrut tenaga kerja dari Kabupaten Bekasi	6. Upah minimum yang cukup tinggi / hal ini menyebabkan : a. Tenaga kerja di luar Kabupaten Bekasi tertarik untuk bekerja di Kabupaten Bekasi b. Tingkat pemalangan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan.	Peningkatan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di perusahaan melalui skill bagi calon pencari kerja baik soft skill maupun hard skill; re-skilling bagi pekerja yang ter-PMK; up grading skill bagi pekerja yg masih bekerja; Peningkatan pelatihan dan perluasan kesempatan kerja; Peningkatan sarana HIF, simplifikasi pernyataan kerja dan harmonisasi antara pekerja dan pengusaha; peningkatan informasi pasar			Perluasan Kesempatan Kerja	110,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
						Dinas Ketenagakerjaan dengan BLE didalamnya akan kembali menggenkan pelatihan yang bersifat ketrampilan untuk diarahkan lulusannya menjadi wiraswasta mandiri.	Kurangnya Informasi pasar kerja			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	400,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
											Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	300,000,000	Dinas Ketenagakerjaan



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG	PENJELASAN FAKTOR PENGHAMBAT	STRATEGI PENINGKATAN CAPAIAN IKU TAHUN 2023	PROGRAM PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	SUB KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	ANGGARAN SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI								
										Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	500,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
										Perubahan Pemukiman Penduduk yang Bersasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Bersasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	375,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
											Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	85,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
											Penyuluhan Transmigrasi	150,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
											Pelatihan Transmigrasi	50,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
										Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	425,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
											Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	200,000,000	Dinas Ketenagakerjaan



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG	PENJELASAN FAKTOR PENGHAMBAT	STRATEGI Peningkatan Capaian IKU Tahun 2023	PROGRAM PENDUKUNG IKU Tahun 2022	KEGIATAN PENDUKUNG IKU Tahun 2022	SUB KEGIATAN PENDUKUNG IKU Tahun 2022	ANGGARAN SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI								
7	INDEKS PEMBANGUNAN GENDER	90,32	88,58	90,81				Merjalin komitmen dengan seluruh SKPD di Kabupaten Bekasi Agar dapat mengelola Anggaran yang Responsif Gender	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelaksanaan PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
								meningkatkan kualitas peran serta layanan pemberdayaan perempuan terhadap pembinaan dan pendampingan organisasi perempuan			Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
								Meningkatkan kebutuhan sarana prasarana pelayanan pengaduan korban kekerasan			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	105,000,000	
								Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparaturn/mediator/konselor pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan SDG yang handal dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan.			Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	95,000,000	



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG	PENJELASAN FAKTOR PENGHAMBAT	STRATEGI Peningkatan Capaian IKU Tahun 2023	PROGRAM PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	SUB KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	ANGGARAN SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAIRAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI								
								Melaksanakan sosialisasi SOP Pelayanan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak kepada masyarakat		Pemberdayaan Perempuan	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	115,975,000	
								Meningkatkan sinergitas dan kesadaran masing masing OPD serta seluruh masyarakat mengenai pentingnya pencapaian PDWKS pada suatu wilayah sebagai strategi untuk meningkatkan pembangunan daerah.			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	285,871,000	
								Mengoptimalkan koordinasi dan komitmen Antar Lintas sektor untuk meraih kategori Kabupaten Layak Anak		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	advokasi kebijakan dan pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	167,520,000	
								Merumuskan Peraturan Daerah Perlindungan Khusus Anak			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyediaan Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	258,216,000	
									PROGRAM PELINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	80,000,000	



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG	PENJELASAN FAKTOR PENGHAMBAT	STRATEGI PENINGKATAN CAPAIAN IKU TAHUN 2023	PROGRAM PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	SUB KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	ANGGARAN SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI								
						Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana fasilitas pelayanan pengadilan korban Perempuan dan Anak	Masih kurangnya Koordinasi dengan Satgas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	262,044,000	
										Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	145,000,000	
											Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	476,806,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
											Penggiatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100,000,000	
						berusaha untuk terus meningkatkan kader sekoper cinto melalui sosialisasi program sekolah perempuan menggapai impian dan vitalitas	Dalam melaksanakan kegiatan Sekoper Cinto, masih kurangnya SDM para kader/peserta sekoper cinto		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	208,670,000	



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG	PENJELASAN FAKTOR PENGHAMBAT	STRATEGI PENINGKATAN CAPAIAN IKU TAHUN 2023	PROGRAM PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	SUB KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	ANGGARAN SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI								
						Meningkatkan lagi pemahaman masyarakat mengenai profit and benefit dalam mencapai P2WKSS	Dalam mencapai P2WKSS masih kurangnya sinergitas serta kesadaran dari warga dan masing-masing perangkat daerah di lokal P2WKSS bahwa P2WKSS bukan hanya untuk menjadi juara saja tetapi juga untuk meningkatkan pembangunan Desa terutama dalam aspek ekonomi.				Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi IG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	169,570,000	
											Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	396,387,000	
						memfasilitasi Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan IG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	208,300,000	



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG	PENJELASAN FAKTOR PENGHAMBAT	STRATEGI PENINGKATAN CAPAIAN IKU TAHUN 2023	PROGRAM PENDUKUNG IKU TAHUN 2023	KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2023	SUB KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2023	ANGGARAN SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI								
											Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150,000,000	
											Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000	
						Sudah Tersedianya rumah aman/rumah tinggal sebagai fasilitas untuk pelayanan korban kekerasan, Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur dan tenaga ahli psikolog, dan hukum pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi				Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	1,550,000,000	
						Meningkatkan sistem aplikasi data terpadu mengenai Laporan Korban Kekerasan pada Perempuan dan Anak	belum adanya aplikasi data terpadu tentang laporan korban kekerasan pada perempuan dan anak		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Pengumpulan, Pengolahan Analitis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	100,000,000	



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG	PENJELASAN FAKTOR PENGHAMBAT	STRATEGI PENINGKATAN CAPAIAN IKU TAHUN 2023	PROGRAM PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	SUB KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	ANGGARAN SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI								
											Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	500,000,000	
II	PREDIKAT KAB/KOTA LAYAK ANAK	Utama	Proforma	ILA					PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHAA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	670,892,000	
											Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	450,753,000	
						menjalin komitmen yang kuat antar lintas sektor untuk memenuhi data Kabupaten Layak Anak yang dibutuhkan	Dalam mencapai Kabupaten Layak Anak, DPSA menghadapi kesulitan untuk memperoleh data yang valid dan komprehensif dari masing-masing OPD terkait			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	216,080,000	
											Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	225,915,000	



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG	PENJELASAN FAKTOR PENGHAMBAT	STRATEGI PENINGKATAN CAPAIAN IKU TAHUN 2023	PROGRAM PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	SUB KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	ANGGARAN SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI								
											Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	326,380,000	
											Pengutan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	232,057,500	
						Peningkatan pelayanan administrasi pengaduan korban kekerasan	Masih kurangnya SDM tenaga ahli Psikolog dalam pelayanan korban kekerasan		PROGRAM PELINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	75,000,000	
							Belum adanya Pemburan Daerah Perlindungan Khusus Anak				Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	187,950,000	
										Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	100,000,000	
											Pengutan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	75,000,000	



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG	PENJELASAN FAKTOR PENGHAMBAT	STRATEGI PENINGKATAN CAPAIAN IKU TAHUN 2023	PROGRAM PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	SUB KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	ANGGARAN SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI								
										Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	290,000,000	
9	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	80%	85%	100%	59.12%				Program Perwujudan Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	182,000,000.00	Dinas Pariwisata
											Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	84,700,000.00	Dinas Pariwisata
											Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,000,000.00	Dinas Pariwisata
										Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,292,141,000.00	Dinas Pariwisata
											Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	290,000,000.00	Dinas Pariwisata
										Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	37,505,000.00	Dinas Pariwisata
											Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	300,000,000.00	Dinas Pariwisata
										Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Perlengkapan Kantor	300,000,000.00	Dinas Pariwisata
											Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	125,000,000.00	Dinas Pariwisata
											Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	883,694,000.00	Dinas Pariwisata

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG	PENJELASAN FAKTOR PENGHAMBAT	STRATEGI PENINGKATAN CAPAIAN IKU TAHUN 2023	PROGRAM PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	SUB KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	ANGGARAN SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI								
										Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	445,302,000.00	Dinas Pariwisata
										Penyediaan Jasa Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	510,600,000.00	Dinas Pariwisata
											Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	821,300,000.00	Dinas Pariwisata
										Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	300,000,000.00	Dinas Pariwisata
											Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	365,000,000.00	Dinas Pariwisata
											Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	312,118,300.00	Dinas Pariwisata
						Tidak memiliki Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPARDA)	Status lahan beberapa objek wisata belum seluruhnya dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, namun masih banyak dimiliki oleh masyarakat (tanah adat)	peningkatan pendataan di sektor pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	594,000,000.00	Dinas Pariwisata



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG	PENJELASAN FAKTOR PENGHAMBAT	STRATEGI PENINGKATAN CAPAIAN IKU TAHUN 2023	PROGRAM PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	SUB KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	ANGGARAN SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI								
						Terdapat potensi pengembangan pengembangan destinasi wisata rawa binong dan Situ Cibereum	Kurangnya Kuantitas Spesialis SDM Pariwisata Di Dinas Pariwisata.	meningkatkan koordinasi dengan stake holder terkait peningkatan pariwisata di Kabupaten Bekasi		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	877,800,000.00	Dinas Pariwisata
											Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	50,000,000.00	Dinas Pariwisata
										Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	100,000,000.00	Dinas Pariwisata
											Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1,200,200,000.00	Dinas Pariwisata
											Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	50,000,000.00	Dinas Pariwisata
						Sudah berkembangnya destinasi baik dikelola dan dibangun masyarakat ataupun oleh dinas pariwisata. Baik itu destinasi wisata alam, buatan maupun wisata bahari.	Belum maksimalnya promosi baik dari dalam maupun luar daerah, bahkan internasional	meningkatkan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Days Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Facilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	525,000,000.00	Dinas Pariwisata
						Usaha kepariwisataan yang maju dan berkembang (hotel, restaurant, cafe, travel dll).	Promosi pariwisata yang dilakukan masih secara offline, dan perlu pengembangan promosi secara online	meningkatkan kerjasama dan komitmen pariwisata dalam dan luar negeri			Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik dalam dan Luar Negeri	425,000,000.00	Dinas Pariwisata



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG	PENJELASAN FAKTOR PENGHAMBAT	STRATEGI PENINGKATAN CAPAIAN IKU TAHUN 2023	PROGRAM PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	SUB KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	ANGGARAN SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI								
						Terdapat potensi pengembangan pengembangan destinasi wisata rawa binong dan Situ Cibereum	Kurangnya Kualitas SDM Pariwisata Di Dinas Pariwisata.	meningkatkan koordinasi dengan stake holder terkait peningkatan pariwisata di Kabupaten Bekasi		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	877,800,000.00	Dinas Pariwisata
											Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	50,000,000.00	Dinas Pariwisata
										Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	100,000,000.00	Dinas Pariwisata
											Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1,200,200,000.00	Dinas Pariwisata
											Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	50,000,000.00	Dinas Pariwisata
						Sudah berkembangnya destinasi baik dikelola dan dibangun masyarakat ataupun oleh dinas pariwisata. Baik itu destinasi wisata alam, buatan maupun wisata bahari.	Belum maksimalnya promosi baik dari dalam maupun luar daerah, bahkan internasional	meningkatkan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Facilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	525,000,000.00	Dinas Pariwisata
						Utaha kepariwisataan yang maju dan berkembang (hotel, restaurant, cafe, travel dll).	Promosi pariwisata yang dilakukan masih secara offline, dan perlu pengembangan promosi secara online	meningkatkan kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri			Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik dalam dan Luar Negeri	425,000,000.00	Dinas Pariwisata



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG	PENJELASAN FAKTOR PENGHAMBAT	STRATEGI PENINGKATAN CAPAIAN IKU TAHUN 2023	PROGRAM PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	SUB KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	ANGGARAN SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAIRAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI								
							Masa pandemi mengakibatkan promosi tidak maksimal karena berpengaruh terhadap pembatasan kunjungan pada suatu event/acara.	menyediakan informasi mengenai kepariwisataan di Kab. Bekasi			Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	550,000,000.00	Dinas Pariwisata
						Adanya usulan dari masyarakat, tersedianya pendamping/insstruktur untuk mengasah keterampilan pelaku ekraf, sudah ada pelaku ekraf yang memiliki hak kekayaan intelektual walaupun belum seluruhnya, harus ditingkatkan lagi sistem pemasaran baik off line maupun on line		memfasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata kabupaten/kota	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Pengembangan Pendidikan	188,686,000.00	Dinas Pariwisata



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG	PENJELASAN FAKTOR PENGHAMBAT	STRATEGI PENINGKATAN CAPAIAN IKU TAHUN 2023	PROGRAM PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	SUB KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	ANGGARAN SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAIRAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI								
							Belum ada tidak adanya kejelasan batasan antara pelaku ekonomi kreatif dan UMKM	memberikan pelatihan keterampilan bagi pelaku ekonomi kreatif, memberikan sosialisasi tentang HKI, memfasilitasi pelaku ekraf untuk mengembangkan dan memasarkan produk melalui pameran ekonomi kreatif			Facilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	237,388,000.00	Dinas Pariwisata
							Belum adanya updating data pelaku ekonomi kreatif.				Pengembangan Sistem Pemasaran	158,526,000.00	Dinas Pariwisata
											Facilitasi Kekayaan Intelektual	358,880,000.00	Dinas Pariwisata
							Keberbatasan dalam penguasaan sistem pasar dalam rangka pengembangan pariwisata				Perlindungan Hasil Kreativitas	275,000,000.00	Dinas Pariwisata



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG	PENJELASAN FAKTOR PENGHAMBAT	STRATEGI PENINGKATAN CAPAIAN IKU TAHUN 2023	PROGRAM PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	SUB KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	ANGGARAN SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI								
						mengelepon perencanaan yang tepat dan kolaborasi secara parhahili, maka kualitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif semakin profesional	belum adanya grand design pengembangan SDM kepariwisataan, minimnya pengetahuan kepariwisataan bagi masyarakat, kurangnya sinergitas pengembangan antar desa dan masyarakat penggit, lemahnya pemahaman potensi pariwisata di tingkat desa, masih maraknya stitir premanisme di tingkat bawah/desa	peningkatan kualitas SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif utaka holder internal dan eksternal	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kamitiran Pariwisata	370,800,000.00	Dinas Pariwisata
											Pelatihan Dasar SDM Keperawatan Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	351,700,000.00	Dinas Pariwisata
											Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	307,850,000.00	Dinas Pariwisata
											Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	300,000,000.00	Dinas Pariwisata



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG	PENJELASAN FAKTOR PENGHAMBAT	STRATEGI Peningkatan Capaian IKU Tahun 2023	PROGRAM PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	SUB KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	ANGGARAN SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI								
10	PERSENTASE PERTUMBUHAN UMKM BARU	80%	113%	100%	125%	Adanya Kebijakan aturan perbup/penda tentang pemberdayaan usaha mikro No. 73 tahun 2020 tentang Pola Kemitraan usaha mikro dengan usaha besar	SDM wirausaha masih banyak yang belum memahami teknologi,	Meningkatkan produktivitas umkm, Meningkatkan akses permodalan umkm, Peningkatan Kualitas Produk UMKM, Peningkatan Akses Pemasaran UMKM	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Facilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produk dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi (Pelatihan bagi Wirausaha baru)	1,184,466,700	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Peluang Kemitraan Usaha Mikro dengan Usaha Besar terbuka luas, mengingat potensi Kabupaten Bekasi sebagai kawasan industri	Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Pasar wirausaha yang pada umumnya merupakan unit usaha Perorangan	Peningkatan jumlah kerjasama kemitraan usaha mikro dengan usaha besar	PROGRAM PEMBUDIDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pembudayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perolehan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pembudayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro (Pelatihan bagi Wirausaha baru bagi Star-Up dan Scale Up)	1,236,166,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Adanya Bantuan CSR dari Perusahaan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Dukungan dan Support dari Perbankan, BUMN dan Stakeholder lainnya	Kurangnya kemampuan manajemen bagi UMKM	Perluasan strategi pemberdayaan dan pemasaran melalui lembaga atau instansi lainnya					

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG	PENJELASAN FAKTOR PENGHAMBAT	STRATEGI Peningkatan Capaian IKU Tahun 2023	PROGRAM PENDUKUNG IKU Tahun 2022	KEGIATAN PENDUKUNG IKU Tahun 2022	SUB KEGIATAN PENDUKUNG IKU Tahun 2022	ANGGARAN SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI								
						Dukungan program dan anggaran dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat bagi Pelaku Usaha Mikro	Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha, Kurangnya Informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak dapat berkembang dan kurang mendukung kemajuan UMKM						
						Dukungan teknologi market place memudahkan pemasaran produk usaha mikro							
11	Persentase Pertumbuhan Wirausaha IKM Baru	80%		100%									



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG	PENJELASAN FAKTOR PENGHAMBAT	STRATEGI PENINGKATAN CAPAIAN IKU TAHUN 2023	PROGRAM PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	SUB KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	ANGGARAN SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI								
12	INDEKS PENDIDIKAN	70,53%	67,39%	71,93%	67,39%	Ketersediaan anggaran yang memadai	Bekasi merupakan Daerah Urban, banyak penduduk yang datang dari luar daerah, sementara data kependudukan nya masih di daerah asal dan banyak juga siswa ulah sekolah yg bersekolah ke luar Bekasi yang berada di daerah lain.	Meningkatkan Akseibilitas, mutu dan tata kelola Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Mebel Sekolah	8,830,500,000	DINAS PENDIDIKAN
											Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	700,000,000	
											Penyusunan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	300,000,000	
											Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1,300,000,000	
											Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	202,475,650,000	
											Pengembangan Ketr. Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1,400,000,000	
											Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	450,000,000	
											Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	550,000,000	



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG	PENJELASAN FAKTOR PENGHAMBAT	STRATEGI PENINGKATAN CAPAIAN IKU TAHUN 2023	PROGRAM PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	SUB KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	ANGGARAN SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI								
										Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Mebel Sekolah	2,525,000,000	
											Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1,000,000,000	
											Penyusunan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	200,000,000	
											Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1,550,000,000	
											Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	87,832,550,000	
											Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1,200,000,000	
											Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1,023,308,594	
											Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	400,000,000	
										Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	50,000,000	
											Penyediaan Biaya Pemonoril Peserta Didik PAUD	300,000,000	
											Pengadaan Alat Praktis dan Tenaga Siswa PAUD	75,000,000	
											Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	471,250,000	



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG	PENJELASAN FAKTOR PENGHAMBAT	STRATEGI PENINGKATAN CAPAIAN IKU TAHUN 2023	PROGRAM PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	SUB KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	ANGGARAN SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI								
											Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	700,000,000	
											Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	710,000,000	
										Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	975,000,000	
											Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	700,000,000	
											Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	180,000,000	
									Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	500,000,000	
										Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	350,000,000	
15	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat UHH	75,49	75,81			Ponyandu di seluruh wilayah puskesmas sudah mulai aktif kembali	adanya kondisi pandemi covid-19 di kabupaten bekasi	meningkatkan promosi pelayanan ibu hamil di ponyandu dan melibatkan peran serta aktif masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Bujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	345,500,000	1. Dinas Kesehatan



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG	PENJELASAN FAKTOR PENGHAMBAT	STRATEGI PENINGKATAN CAPAIAN IKU TAHUN 2023	PROGRAM PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	SUB KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	ANGGARAN SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI								
						Terdapat jaminan pemalihan yang berkontribusi terhadap peningkatan keselamatan ibu hamil saat melahirkan	Terdapat ibu hamil yang beralih bukan difasilitasi pelayanan kesehatan	meningkatkan promosi pelayanan ibu beralih di pusyandu dan melibatkan peran serta aktif masyarakat, Puskesmas membuat inovasi untuk pelayanan terhadap ibu beralih (Kunjungan Rumah)			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Beralih	525,500,000	1. Dinas Kesehatan
						peran aktif petugas kesehatan dan kader dalam pemanfaatan pusyandu	kurangnya kesadaran ibu balita tentang pentingnya memeriksakan balita di pusyandu secara rutin	meningkatkan promosi pelayanan balita di pusyandu dan melibatkan peran serta aktif masyarakat			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	175,000,000	1. Dinas Kesehatan
						Penjaringan dilakukan secara bertahap dengan pelaksanaan vaksinasi	pandemi sekolah masih Pembatasan Tatap Muka terbatas, sehingga petugas sulit untuk melakukan pemeriksaan, banyak orang tua yang melarang anaknya diperiksa karena khawatir anaknya tertular	melakukan pemeriksaan kesehatan dengan metode google form			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	136,500,000	1. Dinas Kesehatan



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG	PENJELASAN FAKTOR PENGHAMBAT	STRATEGI PENINGKATAN CAPAIAN IKU TAHUN 2023	PROGRAM PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	SUB KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	ANGGARAN SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI								
						tenaga kesehatan yang sudah terampil	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan medical check up secara mandiri, sistem pencatatan dan pelaporan kegiatan luar gedung belum terkoordinasi dengan baik, data yang diperoleh belum mencakup dari semua fasilitas kesehatan yang ada, berkurangnya kunjungan sehubungan dengan masa pandemi covid-19	meningkatkan sosialisasi skrining kesehatan pada semua instansi/perusahaan, meningkatkan kerjasama dengan fasilitas kesehatan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan skrining kesehatan, meningkatkan media KIE bagi tenaga kesehatan dan masyarakat, peningkatan kualitas data terutama di tingkat Puskesmas dan fasilitas kesehatan swasta, kompetensi/kemampuan			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Uraa Produktif	178,350,000	1. Dinas Kesehatan
						Pelayanan kesehatan diperuntukan bagi lansia di pantiwiyah	adanya kekhawatiran lansia untuk berkunjung ke pantiwiyah karena takut terpapar covid-19, adanya pembatasan kegiatan masyarakat sehingga berdampak pada pantiwiyah yang dibatasi.	melakukan penyuluhan lansia pada zona hijau dan kuning dengan protokol dan pembagian jadwal kelompok sehingga tidak terjadi kerumunan, melakukan kunjungan rumah pada lansia yang berisiko tinggi sehingga lansia tetap terlayani untuk mendapat pelayanan kesehatan			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Uraa Lanjut	191,500,000	1. Dinas Kesehatan



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG	PENJELASAN FAKTOR PENGHAMBAT	STRATEGI PENINGKATAN CAPAIAN IKU TAHUN 2023	PROGRAM PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	SUB KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	ANGGARAN SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI								
						Adanya aplikasi SIFTM	kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan skrining kesehatan sehingga banyak orang yang tidak mengetahui jika dirinya menderita hipertensi, Masih terbatasnya ketersediaan posbindu, data dari fasilitas kesehatan swasta belum dilaporkan semua.	meningkatkan kerjasama lintas sektor (perusahaan, organisasi profesi, kantor pemerintah) untuk melakukan pelayanan skrining ditempat kerja, memanfaatkan aplikasi yang sudah ada serta meningkatkan koordinasi dan pertemuan dengan fasilitas pemerintah maupun swasta.			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	50,000,000	1. Dinas Kesehatan
						Adanya aplikasi SIFTM	Adanya pandemi covid-19 sehingga program tidak berjalan dengan optimal, kurangnya kesadaran penderita untuk melakukan kontrol secara berkala, terbatasnya ketersediaan posbindu, gaya dan pola hidup yang kurang sehat	KIE tentang pentingnya pola hidup sehat, gerakan masyarakat sehat (GERMAS), dan cerdik, memberikan penyuluhan kesadaran tentang pentingnya skrining di posbindu			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	152,250,000	1. Dinas Kesehatan



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG	PENJELASAN FAKTOR PENGHAMBAT	STRATEGI PENINGKATAN CAPAIAN IKU TAHUN 2023	PROGRAM PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	SUB KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	ANGGARAN SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI								
							Belum tersusunnya Rencana Aksi Daerah (RAD) TBC di Kabupaten Bekasi, belum optimalnya pencatatan pelaporan kasus TBC di Klinik swasta,	Penyusunan RAD TBC di Kabupaten Bekasi, Sosialisasi ke farmasis mengenai TBC, membuat surat edaran penekanan MOU klinik dan Puskesmas wilayah setempat			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	625,000,000	1. Dinas Kesehatan
						Adanya kerjasama dengan LSM untuk melakukan pendampingan dan pencatatan terhadap layanan PDP	Jumlah layanan PDP di Kabupaten masih sedikit (1 Rumah sakit, 3 Puskesmas), Puskesmas layanan PDP yang saat ini ada belum berjalan secara optimal	Pelayanan PDP di Puskesmas mulai dioptimalkan kembali,			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	440,500,000	1. Dinas Kesehatan
						Bantuan anggaran dari DAK non fisik tahun 2021 untuk kegiatan covid-19		meningkatkan antispasi kewaspadaan masyarakat terhadap bencana			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kejadian Luar Biasa (KLB)		1. Dinas Kesehatan
						SDM kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan di pos pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak bencana sudah terpenuhi.					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan /atau berpotensi Bencana.	3,310,000,000	1. Dinas Kesehatan



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		PENDELASAN FAKTOR PENDUKUNG	PENDELASAN FAKTOR PENGHAMBAT	STRATEGI PENINGKATAN CAPAIAN IKU TAHUN 2023	PROGRAM PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	SUB KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	ANGGARAN SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI								
						Pelaksanaan program pendukung stunting	Pembelajaran dilakukan secara daring sehingga menghambat program pemberian Tablet tambah darah untuk remaja putri	meningkatkan peran serta masyarakat untuk mendukung pencapaian program stunting			Pengelolaan kesehatan gizi masyarakat	100,000,000	1. Dinas Kesehatan
						Pelaksanaan pembinaan kesehatan kerja ke perusahaan tetap berjalan dengan baik		melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan swasta dan melakukan pembinaan kesehatan kerja			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	134,850,000	1. Dinas Kesehatan
						Supporting anggaran tambahan dari DAK fisik tahun 2021	Terjadinya pandemi covid-19	meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan lingkungan			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	279,850,000	1. Dinas Kesehatan
						metode dan media yang digunakan untuk promosi kesehatan mudah dipahami oleh masyarakat		mengadakan sosialisasi ke masyarakat mengenai kesehatan			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		1. Dinas Kesehatan
						Peranganan covid-19sekitar menggunakan pengobatan medik juga diperlukan pengobatan tradisional	kegiatan pengobatan tradisional tidak dapat dilakukan karena adanya covid-19 galombang ke-2	memberikan pelatihan asuhan mandiri dan pengobatan tradisional kepada masyarakat			Pengelolaan Kesehatan tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	250,000,000	1. Dinas Kesehatan



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG	PENJELASAN FAKTOR PENGHAMBAT	STRATEGI PENINGKATAN CAPAIAN IKU TAHUN 2023	PROGRAM PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	SUB KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	ANGGARAN SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI								
						1.kondisi demografi kabupaten bekasi adalah pelataan sehingga memudahkan petugas dalam pelacakan kasus, 2. sumber data penyakit baik di fihak pemerintah maupun di swasta jelas dan terintegrasi dengan laboratorium pemeriksaan daerah	tupoksi petugas surveillance masih rangkap jabatan sehingga kegiatan surveillance terhambat	meningkatkan lagi kemampuan petugas pengelola surveillance kesehatan			Pengelolaan Surveillance Kesehatan	375,000,000	1. Dinas Kesehatan
						petugas yang sudah memadai	Stigma masyarakat tentang ODG yang masih buruk, menganggap ODG adalah aib keluarga, kurangnya SDM petugas pengelola, kurangnya peran serta masyarakat	melakukan kunjungan dengan menggunakan pro kesehatan, penyuluhan ODG kepada masyarakat, meningkatkan kerjasama dan pendekatan dengan keluarga, melaksanakan pelatihan dan pembinaan untuk tenaga kesehatan			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	75,000,000	1. Dinas Kesehatan
						banyaknya petugas yang sudah dilatih untuk menangani kesehatan jiwa dan NAPZA	kurangnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan kesehatan jiwa dan NAPZA	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kesehatan jiwa dan NAPZA			Pengelolaan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	75,000,000	1. Dinas Kesehatan



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG	PENJELASAN FAKTOR PENGHAMBAT	STRATEGI Peningkatan Capaian IKU Tahun 2023	PROGRAM PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	SUB KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	ANGGARAN SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI								
						dukungan dari stake holder sudah baik, sudah ada kerjasama dengan rumah sakit khusus (RS. Cicendo), dukungan tempat operasi dari RS cukup bagus	Akibat adanya pandemi sehingga pelaksanaan operasi katamir hanya 1 kali (target 4 kali), terbatasnya detail sasaran katamir yang harus dioperasi karena pandemi	meningkatkan detail sasaran yang harus dioperasi			Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	900,000,000	1. Dinas Kesehatan
						Adanya aplikasi SIPTM		meningkatkan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular dengan mengadakan pelayanan di proyandu atau diporbindu			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	475,000,000	1. Dinas Kesehatan
						mendapatkan bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat untuk membayar tagihan jaminan kesehatan masyarakat	masih kurangnya anggaran untuk membayar tagihan jaminan kesehatan masyarakat	melakukan perencanaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dalam pengelolaan jaminan kesehatan			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	238,268,967,200	1. Dinas Kesehatan
						Adanya pertemuan forum kabupaten/kota sehat tingkat kabupaten		melaksanakan pertemuan forum kabupaten/kota sehat			Penyelenggaraan kabupaten/kota Sehat	72,500,000	1. Dinas Kesehatan
						Adanya Anggaran tambahan dari DAK non fisik untuk pelaksanaan akreditasi	karena kondisi covid-19 sehingga pelaksanaan akreditasi tidak bisa dilakukan	melakukan kerjasama dengan kementerian untuk pelaksanaan akreditasi			Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di kabupaten/kota	1,400,000,000	1. Dinas Kesehatan



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG	PENJELASAN FAKTOR PENGHAMBAT	STRATEGI PENINGKATAN CAPAIAN IKU TAHUN 2023	PROGRAM PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	SUB KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	ANGGARAN SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI								
						Adanya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada masyarakat		meningkatkan kemampuan petugas dalam pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah			Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	232,000,000	1. Dinas Kesehatan
						RS mendukung program pemerintah, Rumah sakit berkomitmen melaksanakan sesuai aturan perundang-undangan	Terdapat beberapa RS yang belum akreditasi, masih ada RS yang belum kerjasama dengan Jamkesmas dan BPJS	meningkatkan pengelolaan tata kelola rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan		Penerbitan Ijin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan tata kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah kabupaten/kota	137,600,000	1. Dinas Kesehatan
						Praktekman di Kab. Bekasi sudah terakreditasi	Adanya pandemi covid sehingga Praktekman yang Re-Akreditasi tidak bisa dilakukan	meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	400,000,000	1. Dinas Kesehatan
						Terdapatnya aplikasi OSS RBA	aplikasi OSS belum terintegrasi dengan baik	memberikan pembinaan dan pengawasan kepada tenaga kesehatan dan tindak lanjut pembinaan praktik tenaga kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESIHATAN	Pemberian Ijin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Pembinaan Praktik Tenaga Kesehatan	150,000,000	1. Dinas Kesehatan



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG	PENJELASAN FAKTOR PENGHAMBAT	STRATEGI PENINGKATAN CAPAIAN IKU TAHUN 2023	PROGRAM PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	SUB KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	ANGGARAN SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI								
						pendayagunaan sumber daya kesehatan yang optimal	pada sub kegiatan ini ada belanja insentif, sementara dasar pemberian insentif adalah kasus terkonfirmasi positif, dan di lapangan kasus mulai agustus sampai Desember sudah rendah sehingga penyerapan insentif pun menjadi rendah	meningkatkan kemampuan petugas kesehatan agar sesuai dengan standar		Penencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UOM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumberdaya manusia Kesehatan sesuai Standar	100,000,000	1. Dinas Kesehatan
							sumber daya manusia belum terpenuhi	Memberikan dukungan serta mengawasi pengembangan dan pemberdayaan SDM untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	125,000,000	1. Dinas Kesehatan
						Kegiatan peningkatan kompetensi dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi zoom dengan kurikulum berbasis kompetensi	Kurang waktunya untuk melakukan pelatihan lagi, karena anggaran BOK nya belum turun pertengahan tahun	Mengadakan pelatihan untuk pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota	200,000,000	1. Dinas Kesehatan



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		PENILAIAN FAKTOR PENDUKUNG	PENILAIAN FAKTOR PENGHAMBAT	STRATEGI PENINGKATAN CAPAIAN IKU TAHUN 2023	PROGRAM PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	SUB KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	ANGGARAN SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI								
						Adanya Aplikasi OSS untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam memperoleh perijinan	SDM tim Pengawas perijinan masih belum memadai	mengoptimalkan penggunaan aplikasi OSS	PROGRAM SEDUHAN FARMASI, ALAT KESIHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemberian Ijin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optika, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perijinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optika, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100,000,000	1. Dinas Kesehatan
						Sebagian besar masyarakat telah menyadari tentang pentingnya Ijin usaha mikro obat tradisional	SDM tim Pengawas perijinan masih belum memadai	meningkatkan kemampuan petugas farmasi untuk memediasi/realisasikan pentingnya Ijin UMOT			Penyediaan dan Pengelolaan data perijinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Ijin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optika, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		1. Dinas Kesehatan
						proses perijinan berusaha sudah dielenggarakan terpusat melalui aplikasi	Ijin Produk PKRT di OSS belum Terkoneksi dengan DPMPTSP, sehingga untuk Ijin produksinya tidak dapat dikeluarkan	meningkatkan pengawasan terhadap sarana dan prasarana produksi alat kesehatan untuk melindungi masyarakat dari alih dan PKRT yang tidak sesuai standar.		Pemberian sertifikat produk untuk sarana produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan pembekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga	Pengendalian dan pengawasan serta tindakan lanjut pengawasan sertifikat produk alat kesehatan kelas 1 tertentu dan PKRT kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga	20,000,000	1. Dinas Kesehatan
						sinergitas dan keterlibatan semua pihak dalam pengawasan pangan sudah terkoordinir dengan baik	Terlalu banyaknya sarana dan kurangnya SDM	meningkatkan jumlah SDM untuk melakukan pengawasan pangan		Penerbitan sertifikat produk Pangan Industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai Ijin produk, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri rumah tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produk Pangan Industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai Ijin produk, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri rumah tangga	100,000,000	1. Dinas Kesehatan



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG	PENJELASAN FAKTOR PENGHAMBAT	STRATEGI PENINGKATAN CAPAIAN IKU TAHUN 2023	PROGRAM PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	SUB KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	ANGGARAN SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI								
						terjalinya kerjasama yang baik antara pengusaha depot dengan petugas yang melakukan pengawasan	Masih banyak sarana yang belum memenuhi standar	melakukan pembinaan dan pengawasan depot air minum agar memenuhi syarat.		Pemerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain (jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM)	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan Pemerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain (jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM)	58,000,000	1. Dinas Kesehatan
						Adanya bantuan anggaran DAK non fiskal (DOK Kesehatan) bidang pengawasan obat dan makanan	masih banyak sarana P-HET yang belum memenuhi persyaratan	meningkatkan pengawasan terhadap industri rumah tangga pangan		Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produk dan produk makanan minuman industri rumah tangga	Pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan		1. Dinas Kesehatan
						Dukungan dan peran OPD terkait, Tersedianya anggaran pelaksanaan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Terbatasnya Jumlah SDM Promosi Kesehatan, Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama lintas sektor dan lintas program	meningkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan promosi kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokat, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokat, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	1,191,360,000	1. Dinas Kesehatan
						Adanya Dana yang Mendukung pada pelaksanaan Promotif dan preventif, Tenaga Kesehatan yang aktif dan profesional, adanya Media promotif.	Kurangnya Sarana Prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan promotif dan preventif ke masyarakat misalnya mobil promotif	meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup bersih dan sehat			Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	350,000,000	1. Dinas Kesehatan



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG	PENJELASAN FAKTOR PENGHAMBAT	STRATEGI PENINGKATAN CAPAIAN IKU TAHUN 2023	PROGRAM PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	SUB KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	ANGGARAN SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI								
						Adanya Landasan Hukum terkait, Dukungan Untas OPD terkait, Tenaga Kesehatan yang Profesional, adanya dukungan CSR / LSM, Masyarakat atau tokoh masyarakat yang sadar akan Perilaku Sehat	Kurangnya Pengalaman ketrampilan dan pengetahuan serta konsep diri tentang kesehatan pada kader, kurangnya kesadaran Masyarakat, Kurangnya etika sosial dan budaya baik penekonomian, agama, masih lemahnya dukungan stakeholder, pesan kesehatan dari media masa masih diabaikan	mengadakan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan sumber daya masyarakat		Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bermember daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten/kota	Bimbingan Teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bermember daya masyarakat (UKBM)	166,800,000	1. Dinas Kesehatan
14	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	53	48,025	53	Pertimbangan baru akan dilakukan di akhir tahun	Adanya kerja sama dan kekompakan dalam team work sehingga	Masih adanya status PPKM di Jawa Bali sehingga banyak	1. Pengendalian pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	331000000	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi
									Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1235276000	
											Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan iklim	241665000	
											Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	6381428593	



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG	PENJELASAN FAKTOR PENGHAMBAT	STRATEGI PENINGKATAN CAPAIAN IKU TAHUN 2023	PROGRAM PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	SUB KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	ANGGARAN SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI								
										Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	600000000	
									Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (BB) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah BB)	Penyimpanan Sementara Limbah BB	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administratif dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah BB	1300000000	
									Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPULH) Kabupaten/Kota	Pengendalian Pelaksanaan RPPULH Kabupaten/Kota	563191000	
										Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	1046326501	
											Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMMD	0	
									Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	885179800	
											Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	375790000	



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		PENILAIAN FAKTOR PENDUKUNG	PENILAIAN FAKTOR PENGHAMBAT	STRATEGI PENINGKATAN CAPAIAN IKU TAHUN 2023	PROGRAM PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	SUB KEGIATAN PENDUKUNG IKU TAHUN 2022	ANGGARAN SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI								
									Program Pengelolaan Pemampahan	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Dielenggarakan oleh Pihak Swasta	Facilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknik Pengelolaan Sampah	130766000	
									Program Peningkatan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	92617000	
											Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sistem Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	8137000	
									Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	246252300	
									Program Pengelolaan Pemampahan	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	500000000	
											Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	1601581580	
										Pengelolaan Sampah	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	100191010	
											Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Pemampahan	8666229178	
											Penyediaan Sarana	23916380000	



Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pencapaian Prioritas Pembangunan Propinsi dan Nasional Untuk tahun 2020-2024, Pemerintah Pusat menyusun arah kebijakan pembangunan nasional berdasarkan pada 5 arahan utama presiden, antara lain:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi

Segala bentuk kendala regulasi, terutama menerbitkan 2 undang-undang dengan pendekatan omnibus law. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, dengan terjadinya pandemi global Covid-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020, maka tema pembangunan RKP 2022 diarahkan kepada proses pemulihan pembangunan nasional yang terdampak pandemi Covid-19. Dengan fokus pembangunan pada pemulihan industri, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional; reformasi sistem perlindungan sosial; dan reformasi sistem ketahanan bencana. Sementara sasaran pembangunan diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi, khususnya perekonomian nasional yang terdampak pandemi Covid-19, pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pemerataan, kualitas lingkungan hidup, pertumbuhan industri, dan pembangunan pariwisata. Mengacu pada tema, fokus, dan sasaran pembangunan tahun 2022, maka arah kebijakan yang



akan ditempuh pada RKP 2022 adalah percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan menitikberatkan pelaksanaan pembangunan pada pemulihan industri dan perdagangan, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional melalui penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), health security, dan sumber daya sektor kesehatan; reformasi sistem perlindungan sosial melalui peningkatan akurasi penyaluran dan integrasi berbagai program bantuan dan jaminan sosial; serta reformasi sistem ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan di masa prabencana dan penguatan sistem operasi tanggap darurat, baik bencana alam maupun bencana nonalam. Berdasarkan arah kebijakan pembangunan tahun 2022, terdapat Proyek Prioritas Strategis (Major Project) yang terkait langsung dengan fokus pembangunan tahun 2022, antara lain: (1) Industri 4.0 di lima sub sektor prioritas: makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, otomotif, elektronik, kimia dan farmasi; (2) Sepuluh destinasi pariwisata prioritas: Danau Toba, Borobudur, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo- Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai; (3) Sembilan kawasan industri di luar Jawa dan 31 Smelter; (4) Pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0; (5) Jaringan pelabuhan utama terpadu; (6) Penguatan sistem kesehatan nasional; (7) Integrasi bantuan sosial menuju skema perlindungan sosial menyeluruh; serta (8) Penguatan sistem peringatan dini bencana.

Adapun di tingkat regional, arah kebijakan ekonomi Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2022 difokuskan pada pemulihan ekonomi yang diarahkan kepada penyerapan tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja, dan membangkitkan kembali aktivitas usaha yang sudah ada. Dalam rangka pelaksanaan pemulihan ekonomi tersebut, ditetapkan beberapa strategi dan arah kebijakan, yaitu:

a. Pemulihan Industri dan Perdagangan

- 1) Meningkatkan perlindungan dan keahlian tenaga kerja;
- 2) Mengakselerasi perwujudan kawasan industri terpadu dalam konteks pengembangan industri 4.0;
- 3) Meningkatkan implementasi pola kemitraan antara industri besar dengan IKM;
- 4) Meningkatkan ekspor melalui pengembangan pasar ekspor nontradisional dan peningkatan kerja sama perdagangan luar negeri;
- 5) Digitalisasi koperasi dan UMKM untuk peningkatan daya saing;
- 6) Peningkatan kapasitas fiskal Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang menjadi bagian



dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat melalui penyertaan modal daerah untuk membantu efektivitas kebijakan relaksasi kredit bagi IKM dan UMKM.

- b. Perbaikan Sistem Pangan Meningkatkan ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan melalui peningkatan produksi dan pasokan pangan.
- c. Pembangunan pariwisata pemulihan kinerja pariwisata dengan:
 - 1) Mengembangkan destinasi pariwisata dan meningkatkan kualitas ekonomi kreatif dan digital; dan
 - 2) Peningkatan promosi pariwisata berbasis digital dengan branding baru yang mengutamakan protokol kesehatan.
- d. Percepatan Investasi
 - 1) Mengoptimalkan promosi investasi dan fasilitasi para calon investor;
 - 2) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal; dan
 - 3) Fasilitasi untuk percepatan proyek-proyek investasi yang terhambat pelaksanaannya.
- e. Pembangunan infrastruktur mendorong pembangunan infrastruktur yang bersifat padat karya.
- f. Penguatan Sektor Kesehatan:
 - 1) Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar, rujukan, dan jaminan kesehatan;
 - 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat.

Di tingkat kabupaten, upaya pemantapan perekonomian daerah diarahkan kepada penguatan sektor pertanian, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata, serta pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, ketenagakerjaan dan koperasi.

Adapun strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- Strategi meningkatkan produktivitas dan kualitas sektor pertanian, dengan arah kebijakan:
 - (a) Meningkatkan teknologi pertanian dan optimalisasi lahan pertanian; dan
 - (b) Meningkatkan kualitas produksi pertanian.
- Strategi meningkatkan pemasaran hasil pertanian, dengan arah kebijakan membuka akses pemasaran hasil pertanian.
- Strategi meningkatkan produktivitas dan kualitas sektor peternakan, dengan arah kebijakan:
 - (a) Meningkatkan produksi hasil peternakan;
 - (b) Meningkatkan penggunaan teknologi peternakan; dan



- (c) Meningkatkan hasil pemasaran.
- Strategi meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan budidaya, perikanan laut dan perairan umum, dengan arah kebijakan:
 - (a) Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan budidaya, perikanan laut dan perairan umum;
 - (b) Meningkatkan produksi perikanan laut dan perairan umum; dan
 - (c) Peningkatan nilai tambah hasil produksi perikanan.
- Strategi meningkatnya ketahanan pangan, dengan arah kebijakan:
 - (a) Meningkatkan keberagaman hasil pertanian dan perkebunan;
 - (b) Meningkatkan cadangan pangan; dan
 - (c) Meningkatkan distribusi pangan.
- Strategi meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pertanian, dengan arah kebijakan:
 - (a) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi;
 - (b) Pembangunan dan pemeliharaan pintu air.
- Strategi penguatan dan pengembangan destinasi pariwisata, dengan arah kebijakan mengoptimalisasi daya dukung potensi pariwisata yang berdaya saing serta pengembangan promosi pariwisata yang kreatif, terarah, terpadu dan berkelanjutan melalui pembuatan kebijakan kepariwisataan.
- Strategi peningkatan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah.
- Strategi meningkatkan kunjungan wisatawan di Kabupaten Bekasi, dengan arah kebijakan:
 - (a) Diversifikasi destinasi wisata seperti wisata alam, industri, sejarah, ziarah dan bahari;
 - (b) Fasilitasi dan mediasi pengembangan kemitraan pariwisata.
- Strategi meningkatkan pengamanan perdagangan, dengan arah kebijakan meningkatkan pelayanan kemetrolgian.
- Strategi meningkatkan daya saing pasar tradisional, dengan arah kebijakan meningkatkan penataan sarana dan prasarana perdagangan.
- Strategi meningkatkan pembinaan dan penataan pedagang kaki lima dan asongan, dengan arah kebijakan mengoptimalkan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.
- Strategi melakukan fasilitasi promosi dagang produk ekspor unggulan, dengan arah kebijakan meningkatkan nilai ekspor produk unggulan.
- Strategi mengoptimalkan peran Kabupaten Bekasi dalam mempercepat pertumbuhan



investasi, dengan arah kebijakan mendorong percepatan pertumbuhan investasi.

- Strategi mempermudah proses perijinan dan non perijinan, dengan arah kebijakan penyederhanaan proses perizinan dan non perizinan melalui pelayanan terpadu.
- Strategi memperluas kesempatan kerja bagi angkatan kerja dan iklim kerja yang kondusif.
- Strategi meningkatkan kesejahteraan pekerja, dengan arah kebijakan pembinaan hubungan industrial meliputi LKS, BIP, pekerja, PP, PKB, P2K3, pengupahan perusahaan.
- Strategi meningkatkan aksesibilitas produktivitas UMKM dan koperasi, dengan arah kebijakan:
 - (a) Pengembangan Koperasi dan UMKM;
 - (b) Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif; dan
 - (c) Meningkatkan kuantitas dan kualitas koperasi sehat.
- Strategi menciptakan wirausahawan baru, dengan arah kebijakan:
 - (a) Peningkatan Akses bagi UMKM; dan
 - (b) Mendorong akses teknologi tepat guna UMKM.
- Strategi pembinaan dan penciptaan wirausahawan IKM, dengan arah kebijakan:
 - (a) Melaksanakan pelatihan dan kemampuan IKM;
 - (b) Mendorong akses teknologi tepat guna IKM.

Selain strategi dan arah kebijakan di atas, kebijakan pembangunan ekonomi daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi juga diarahkan untuk mendukung strategi dan arah kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat, mendukung pencapaian target indikator ekonomi dan makro pembangunan daerah tahun 2022 melalui optimalisasi pelaksanaan program kegiatan prioritas daerah dan lintas sektor, serta pemulihan sosial ekonomi masyarakat pasca Covid-19.

BAB IV FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

4.1 FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

Tingkat capaian penyerapan APBD Kabupaten Bekasi dan Capaian kinerja program dan kegiatan sampai Triwulan IV tahun 2022, secara umum di pengaruhi oleh beberapa faktor pendorong dan penghambat yang sebagai berikut :

A. Faktor Pendorong :

1. Komitmen pimpinan dan aparatur untuk pelaksanaan program dan kegiatan /sub kegiatan untuk selalu normatif sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Terlaksananya kegiatan sesuai dengan waktu yang ditentukan sesuai Arahan dan bimbingan dari pimpinan yang optimal, Dukungan dari staf dan bawahan, Perencanaan kerja yang telah dipersiapkan, Dukungan anggaran yang tersedia, Dukungan data dan informasi yang akurat serta terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang cukup baik.
3. Sinergitas yang baik antara pimpinan dan bawahan dalam melaksanakan kegiatan.
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam keterlibatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

B. Faktor Penghambat :

1. Terdapat kendala utama di dalam Sistem SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) khususnya pada Fitur Penatausahaan Keuangan yang masih belum bisa di gunakan oleh User Perangkat Daerah, sehingga proses pencairan / penyerapan anggaran di Triwulan IV terhambat.
2. Keterbatasan SDM personal
3. Transisi dari sistem lama ke sistem baru yang masih perlu disosialisasikan.



4.2 TINDAK LANJUT BAGI PELAKSANAAN TRIWULAN/RKPD BERIKUTNYA

Berdasarkan dari pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Triwulan IV tahun 2022, beberapa tindak lanjut yang disarankan untuk dilaksanakan pada RKPD berikutnya adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan anggaran yang tepat untuk dilakukan refocusing ke Urusan Wajib Pelayanan Dasar.
2. Melakukan penyerapan anggaran sesuai aliran/ arus kas.
3. Merumuskan suatu inovasi atau terobosan baru dalam meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Bekasi demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di Kabupaten Bekasi di segala bidang.
4. Meningkatkan koordinasi antara pimpinan dan bawahan dalam melaksanakan perencanaan kegiatan yang lebih matang.
5. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan yang lebih ketat dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bekasi agar pembangunan yang di tuju tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.
6. Merumuskan strategi-strategi pembiayaan dan pendanaan pembangunan sesuai aturan berlaku, yang bisa melibatkan sektor swasta / perusahaan untuk bersama-sama melaksanakan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bekasi.



BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN


Selama pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Triwulan IV Tahun anggaran 2022, pencapaian kinerja program dan kegiatan adalah sebesar 25,52 % dengan capaian realisasi penyerapan anggaran sebesar 31,77%. Dilihat dari pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran selama Triwulan IV tahun anggaran 2022, predikat kinerja seluruh program termasuk pada rentang rendah (R), sedangkan untuk penyerapan anggaran terdapat kategori (R) Rendah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pencapaian kinerja selama Triwulan IV adalah terdapat kendala utama di dalam Sistem SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) khususnya pada Fitur Penatausahaan Keuangan yang masih belum bisa di gunakan oleh User Perangkat Daerah, sehingga proses pencairan / penyerapan anggaran di Triwulan IV terhambat dan tidak bisa dilaksanakan.

5.2 REKOMENDASI

Rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun anggaran 2022 untuk triwulan atau RKPD berikutnya adalah dengan menambah atau meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pelaksana kegiatan, perbaikan di sistem penatausahaan keuangan, meningkatkan koordinasi antara BPKD dengan Kementerian Dalam Negeri selaku pemegang Admin SIPD Pusat, perencanaan program dan kegiatan agar lebih akurat dan pendanaan yang tepat, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan oleh perangkat daerah secara berkesinambungan, pembinaan kepada pegawai, serta perlu dilakukan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mengejar keterlambatan pencapaian target pada pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran selanjutnya.

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN BEKASI**


Ir. H. ENTAH ISMANTO, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640105 199402 1 002

